

**PENGARUH KETERBUKAAN EKONOMI TERHADAP
KETIMPANGAN PENDAPATAN DI TINGKAT PROVINSI
DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Yogyakarta untuk Memenuhi
Sebagian Prasyarat guna Memeroleh Gelar Sarjana



Disusun Oleh:
Hanifa Tsany Hasna
11404241047

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2015**

**PENGARUH KETERBUKAAN EKONOMI TERHADAP
KETIMPANGAN PENDAPATAN DI TINGKAT PROVINSI
DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Yogyakarta untuk Memenuhi
Sebagian Prasyarat guna Memeroleh Gelar Sarjana



Disusun Oleh:
Hanifa Tsany Hasna
11404241047

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2015**

SKRIPSI

PENGARUH KETERBUKAAN EKONOMI TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI TINGKAT PROVINSI DI INDONESIA

Disusun Oleh:
Hanifa Tsany Hasna

11404241047

Telah disetujui oleh dosen pembimbing untuk diajukan dan dipertahankan
di depan Tim Penguji Skripsi Program Studi Pendidikan Ekonomi
Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta

Yogyakarta, 15 Oktober 2015
Dosen Pembimbing

Maimun Sholeh

Maimun Sholeh, M. Si

NIP. 19660606 20050 1 002

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

PENGARUH KETERBUKAAN EKONOMI TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI TINGKAT PROVINSI DI INDONESIA

Disusun Oleh:

Hanifa Tsany Hasna

11404241047

Telah dipertahankan di depan Tim Pengaji Tugas Akhir Skripsi Jurusan
Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta pada
tanggal 28 Oktober 2015 dan dinyatakan lulus.



Yogyakarta, 23 November 2015

Dekan Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Yogyakarta

Dr. Sugiharsono, M. Si

NIP. 19550328 198303 1 002

**HALAMAN PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hanifa Tsany Hasna

NIM : 11404241047

Program Studi : Pendidikan Ekonomi

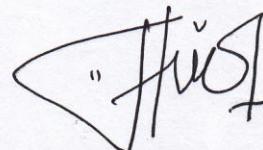
Fakultas : Ekonomi

Judul : PENGARUH KETERBUKAAN EKONOMI TERHADAP KETIMPANGAN PENDAPATAN DI TINGKAT PROVINSI DI INDONESIA

Dengan ini menyatakan skripsi ini benar-benar karya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Yogyakarta, 23 November 2015

Yang menyatakan,



Hanifa Tsany Hasna

NIM. 11404241047

MOTTO

Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab (Lauhul Mahfuz) sebelum Kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikan-Nya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong dan membanggakan diri.

-Al Hadid: 22-23-

Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum, sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri
-Ar Rad': 11-

Pandanglah dan jadikan segala hal yang terjadi dalam rangkaian perjalanan kehidupan sebagai suatu cara untuk bisa membuka pintu surga-Nya
-Syatori Abdur Rauf-

*Hidup selamat dan bermanfaat dengan
ikhtiar, ikhlas, dan gali hikmah*

-penulis-

HALAMAN PERSEMPAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tugas Akhir Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Ke dua orang tua saya dan kakak saya, terima kasih atas ketulusan kasih sayang kalian, kepercayaan kalian, serta lantunan doa kalian yang tak pernah henti tercurahkan untukku..

**PENGARUH KETERBUKAAN EKONOMI TERHADAP
KETIMPANGAN PENDAPATAN DI TINGKAT PROVINSI
DI INDONESIA**

**Oleh:
Hanifa Tsany Hasna
11404241047**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh keterbukaan ekonomi yang terbagi menjadi keterbukaan ekspor, keterbukaan impor, dan keterbukaan penanaman modal asing terhadap ketimpangan pendapatan di tingkat provinsi di Indonesia.

Metode estimasi yang digunakan adalah metode *fixed effect*. Data yang digunakan adalah data panel dari 29 provinsi di Indonesia pada tahun 2007-2013.

Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa hanya keterbukaan ekspor yang memiliki pengaruh signifikan mengurangi ketimpangan pendapatan di tingkat provinsi di Indonesia, sementara keterbukaan impor dan keterbukaan penanaman modal asing tidak berpengaruh secara signifikan.

Kata Kunci: Ketimpangan Pendapatan, Keterbukaan Ekonomi

**THE EFFECT OF ECONOMIC OPENNESS ON INCOME INEQUALITY IN
THE PROVINCE LEVEL IN INDONESIA**

**HANIFA TSANY HASNA
11404241047**

ABSTRACT

This study aimed to investigate the effect of economic openness, consisting of export openness, import openness, and foreign capital investment openness, on income inequality in the province level in Indonesia.

The estimation method was the fixed effect method. The data used were panel data from 29 provinces in Indonesia in 2007-2013.

Based on the results of the analysis, it was found out that only export openness had a significant effect on the reduction of income equality in the province level in Indonesia, while export openness and foreign capital investment openness did not have significant effects.

Keywords: *income equality, economic openness*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, rasa syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia serta nikmat sehat dan nikmat waktu sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul “Pengaruh Keterbukaan Ekonomi terhadap Ketimpangan Pendapatan di Tingkat Provinsi di Indonesia”.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini membutuhkan banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sehingga dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta yang telah memperlancar penyelesaian tugas akhir skripsi ini.
2. Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi yang banyak memberikan arahan dan bantuan dalam pelaksanaan tugas akhir skripsi ini.
3. Bapak Maimun Sholeh, M. Si selaku Dosen Pembimbing atas ketulusan, kesabaran dan waktunya dalam memberikan bimbingan, ilmu dan arahannya demi terselesaiannya skripsi ini. Semoga ilmu yang diberikan bisa memberi manfaat untuk saya dan menjadi amalan beliau dan mengalir pahala baginya.
4. Bapak Bambang Suprayitno, M. Sc selaku narasumber dan penguji utama yang banyak memberikan ilmu, saran dan masukan yang membangun dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga menjadi amal kebaikan dan keberkahan bagi beliau.
5. Ibu Dr. Endang Mulyani, M. Si selaku ketua penguji yang telah berkenan memberikan waktu, arahan, saran dan masukan demi membantu terselesaiannya skripsi ini. Semoga berbalas banyak kebaikan dari-Nya bagi beliau.
6. Bapak ibu dosen Pendidikan Ekonomi terima kasih atas setiap pengetahuan dan ilmu baru yang diberikan karena akan sangat bermanfaat bagi kehidupan saya.

7. Kedua orang tua saya bapak Muslih dan ibu Ambar Hadiati, kakak saya Arif Pradana yang senantiasa melantunkan doa untukku, memberikan dukungan dan kepercayaan padaku, semua itu telah menjadi sumber kekuatan tersendiri dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat terbaik saya Yayu Yulianti, Putri Wulandari, Nanda Putri Amalia, Mohammad Indra Alamsyah, Tiara Puspita Aji, Vidiya Rachmawati, Titi Wahyuni, Yetty Isnawati, Annisa Chiayrotul Wardah, Evinta Yogi Titriani, Nisrina Nurul Fikri, Ratna Diah Pitasari, Tira, Friska Okta, Nita dan teman-teman lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu, keberadaan kalian membuat perantauan ini penuh kehangatan kekeluargaan. Kebahagian teramat sangat dipertemukan dengan kalian, sahabat-sahabat yang saling menyayangi dan saling peduli. terima kasih atas ilmu-ilmu yang secara langsung maupun tidak langsung telah kalian ajarkan.
9. Teman-teman Pendidikan Ekonomi angkatan 2011, terima kasih atas kebersamaan kalian dan terima kasih atas informasi-informasi yang sangat membantu dalam penyelesaian tugas akhir skripsi ini
10. Serta semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tugas akhir skripsi ini.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini memiliki kekurangan. Oleh sebab itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk penelitian lanjutan di masa yang akan datang. Semoga tugas akhir skripsi ini dapat memberi manfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Yogyakarta, 23 November 2015

Penulis,



Hanifa Tsany Hasna

NIM. 11404241047

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GRAFIK	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	12
C. Batasan Masalah.....	12
D. Rumusan Masalah	13
E. Tujuan Penelitian	13
F. Manfaat Penelitian	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
A. Landasan Teori	15
1. Ketimpangan Pendapatan.....	15
a. Ketimpangan Pendapatan	15
b. Teori Ketimpangan Pendapatan	16

c. Pengukuran Ketimpangan Pendapatan.....	17
2. Perdagangan Internasional	19
a. Definisi Perdagangan Internasional	19
b. Teori Perdagangan Internasional.....	19
3. Investasi Asing Langsung	24
a. Definisi Investasi Asing Langsung	24
b. Teori Investasi Asing Langsung.....	25
B. Penelitian Relevan	28
C. Kerangka Pikir	30
D. Hipotesis Penelitian.....	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
A. Desain Penelitian	32
B. Model Data Panel.....	32
C. Jenis dan Sumber Data	35
D. Definisi Operasional Variabel.....	36
E. Teknik Analisis Data.....	39
1. Statistik Deskriptif	39
2. Gambaran Perkembangan Variabel Penelitian	39
3. Pemilihan Metode Estimasi Data Panel	39
4. Uji Asumsi Klasik	40
a. Uji Normalitas.....	40
b. Uji Multikolinieritas.....	41
5. Uji Statistik	42
a. Menghitung Koefisien Determinasi	42
b. Uji Parsial (Uji t).....	42
c. Uji Simultan (Uji F)	42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	43
A. Statistik Deskriptif	43
B. Gambaran Perkembangan Variabel Penelitian	46
C. Penentuan Metode Estimasi Data Panel.....	62

D. Uji Asumsi Klasik	64
1. Uji Normalitas	64
2. Uji Multikolinieritas	65
E. Estimasi Model Regresi	65
F. Uji Signifikansi	66
1. Koefisien Determinasi (R^2)	66
2. Uji Parsial (Uji t)	67
3. Uji Simultan (Uji F)	70
G. Pembahasan Hasil Estimasi dan Interpretasinya.....	70
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran.....	79
1. Bagi Pemerintah	79
2. Bagi Masyarakat dan Individu	80
3. Bagi Peneliti	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN.....	86

DAFTAR GRAFIK

Grafik	Halaman
1. Ekspor-Import Non Migas Indonesia Tahun 1990-2013	4
2. Penanaman Modal Asing Indonesia Tahun 1993-2013	7
3. Nilai dan Rasio Ekspor-Import-Penanaman Modal Asing Rata-Rata Provinsi Per Pulau Tahun 2007 dan 2013.....	8
4. Indeks Gini Indonesia Tahun 2002-2013	10
5. Indeks Gini Rata-Rata Provinsi Per Pulau di Indonesia Tahun 2007 dan 2013.....	10
6. Indeks Gini Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2007-2013	47
7. Ekspor Non Migas Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2007-2013....	49
8. Impor Non Migas Menurut ProvinsiTahun 2007-2013	52
9. Penanaman Modal Asing Menurut Provinsi Tahun 2007-2013	54
10. Angka Partisipasi Murni Menurut Provinsi Tahun 2007-2013	57
11. Rata-rata Lama Sekolah Menurut Provinsi Tahun 2007-2013	59
12. Persentase Tenaga Kerja Sektor Agrikultur Menurut Provinsi Tahun 2007-2013	60
13. Persentase Tenaga Kerja Sektor Industri Menurut Provinsi Tahun 2007-2013	61

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Tingkat Ketimpangan Pendapatan	18
2. Penelitian Relevan	28
3. Perbedaan Variabel dengan Full Model-Jaumotte, et all (2013)	33
4. Variabel Penelitian.....	35
5. Metode Estimasi Data Panel	40
6. Ketentuan Uji Penentuan Teknik Estimasi Data Panel.....	40
7. Statistik Deskriptif	43
8. Hasil Uji Chow	62
9. Hasil Uji Hausman	63
10. Hasil Uji Normalitas	64
11. Hasil Uji Multikolinieritas	65
12. Hasil Estimasi	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pikir	30

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Data Variabel Penelitian	86
2. Hasil Uji Likelihood Ratio/ Uji Chow	92
3. Hasil Uji Hausman	93
4. Hasil Regresi Fixed Effect	94
5. Hasil Uji Asumsi-Normalitas	95
6. Hasil Uji Asumsi-Multikolinearitas	95

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tercapainya kesejahteraan bagi seluruh rakyat adalah tujuan utama dari didirikannya sebuah Negara. Karena pada hakikatnya untuk dapat meningkatkan taraf hidup secara materil tidak mungkin hanya dilakukan dengan kerja keras secara individu, melainkan diperlukan kerjasama antara masyarakat dan negara. Negara memiliki peran yang sangat penting, yaitu untuk mengatur segala pelaksanaan perekonomian agar ketercapaian kesejahteraan dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat bukan hanya segolongan masyarakat.

Beragam upaya dilakukan negara di dunia untuk bisa meningkatkan kondisi perekonomiannya sehingga dapat mensejahterakan seluruh rakyatnya. Kaum sosialis menganggap dominasi pemerintah dalam perekonomian dan minimalisasi hak kepemilikan harta masyarakat adalah cara yang paling tepat untuk mengoptimalkan perekonomian dan mensetarakan kesejahteraan. Hal tersebut seperti yang diungkapkan Whittaker (dalam Deliarnov, 2012: 62) bahwa sistem ekonomi sosialis menunjukkan sistem-sistem pemilikan dan pemanfaatan sumber-sumber produksi (selain *labor*) secara kolektif. Sosialis bisa mencakup asosiasi-asosiasi kooperatif maupun kepemilikan dan pengoperasian oleh pemerintah. Sementara Adam Smith, pencetus sistem ekonomi liberalis memiliki pendapat yang berlawanan dengan sistem ekonomi sosialis. Menurut Smith, Negara sama sekali tidak boleh mengatur perekonomian, melainkan menyerahkan segala

sesuatunya pada *invisible hand*. Dalam sistem ekonomi liberalis, tiap individu diberikan keleluasaan yang besar dalam perekonomian (Deliarnov, 2012: 37). Paham liberalis tersebut didasarkan pada pemikiran Smith (dalam Deliarnov, 2012: 41) bahwa walaupun setiap orang didorong untuk mengejar kepentingannya masing-masing, namun adanya persaingan bebas menjamin masyarakat secara keseluruhan akan menerima *benefit* sehingga akan tercapailah kesejahteraan umum (*general welfare*).

Perkembangan ekonomi dunia saat ini menunjukkan kecenderungan pemberlakuan sistem ekonomi liberalis, dimana hampir seluruh Negara di dunia mempraktekkan ajaran-ajaran ekonomi liberalis. Ajaran-ajaran ekonomi liberalis secara kolektif tercantum dalam Konsensus Washington yang merupakan paket kebijakan racikan para ekonom liberalis Departemen Keuangan Amerika Serikat dan Dana Moneter Internasional (*IMF*) yang pada awalnya ditujukan untuk mengatasi krisis moneter di Amerika Latin pada tahun 1989. Namun pada dekade 1990-an banyak negara yang turut mengaplikasikan Konsensus Washington sebagai upaya untuk mengatasi krisis moneter yang melanda negara-negara berkembang saat itu. Konsensus Washington terdiri atas tiga gagasan utama: pertama, disiplin dalam urusan fiskal dan anggaran; kedua, ekonomi pasar, terutama hak cipta, nilai tukar mata uang yang kompetitif, privatisasi, dan deregulasi; ketiga, keterbukaan terhadap perekonomian global melalui liberalisasi perdagangan dan investasi langsung modal asing (Bremmer, 2011: 15). Dalam gagasan Konsensus Washington tersebut disebutkan bahwa liberalisasi perdagangan dan liberalisasi finansial atau yang seringkali disebut sebagai

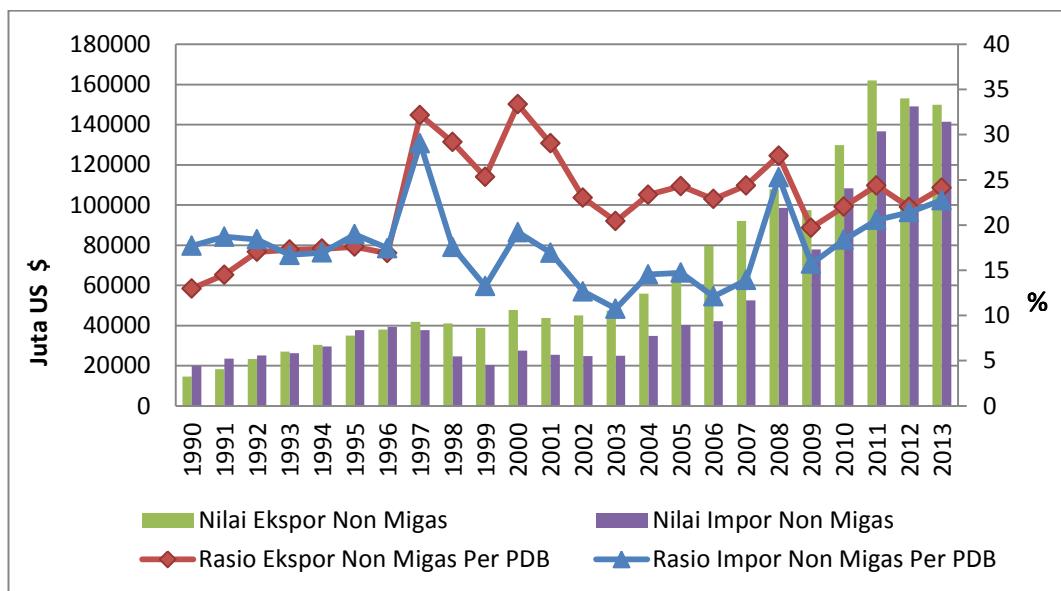
keterbukaan perdagangan dan keterbukaan finansial juga merupakan salah satu cara untuk meningkatkan perekonomian suatu Negara.

Hasil kebijakan keterbukaan perdagangan dan keterbukaan finansial yang diterapkan negara-negara di dunia terlihat dari peningkatan tajam perdagangan dunia antara tahun 1980 hingga 2002 yang mencapai lebih dari tiga kali lipat. Sementara pada tahun 2000, investasi asing langsung modal asing sedunia mencapai 1,4 triliun dollar. (Deliarnov, 2012: 15). Keterbukaan telah mengantarkan negara-negara berkembang pada pertumbuhan ekonomi yang fantastis.

Indonesia sendiri pada tahun 80-an hingga pertengahan 90-an cenderung menggunakan sistem ekonomi campuran seperti yang digunakan di Jerman dan Jepang, dimana Negara menyatu dan mengarahkan perekonomian liberalis yang baru tumbuh melalui proteksi dan subsidi (Deliarnov, 2012: 261). Namun mulai pertengahan 90-an Indonesia semakin memberi peran pada pasar dan mengurangi campur tangan pemerintah melalui deregulasi dan debirokratisasi.

Keterbukaan ekonomi dari sisi perdagangan di Indonesia terwujud pada bergabungnya Indonesia dengan organisasi perdagangan internasional, antara lain *Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)* pada 1989, dan *World Trade Organization (WTO)* pada 1994. Selain itu, Indonesia juga telah melaksanakan cukup banyak kerjasama perdagangan bebas, antara lain *ASEAN Free Trade Area (AFTA)* pada 2002, *ASEAN-China Free Trade Area (ACTFA)* pada 2004, *ASEAN-Korea Trade Area (AKFTA)* pada 2007, *Indonesia-Japan Economic Partnership* pada 2007, *ASEAN-India Free Trade Area (AIFTA)* pada 2010, dan *ASEAN-*

Australia-New Zealand Free Trade Area (AANFTA) pada 2012 (Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral, 2013: 2). Kerjasama-kerjasama itu telah membuat keterbukaan ekonomi Indonesia dari sisi perdagangan meningkat cukup tinggi. Hal ini bisa dilihat dari grafik perdagangan eksport-impor non migas Indonesia tahun 1990-2013 sebagai berikut:



Sumber: Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id)

Grafik 1. Eksport-Impor Non Migas Indonesia Tahun 1990-2013

Pada grafik 1 terlihat bahwa baik berdasarkan nilai maupun rasio eksport non migas telah terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Peningkatan rasio eksport non migas per PDB Indonesia meningkat dari hanya berkisar 15 persen pada tahun 1990 menjadi 25 persen pada tahun 2013. Dengan kata lain telah terjadi peningkatan keterbukaan perdagangan dari sisi eksport sebesar 10 persen. Meskipun rasio eksport terlihat fluktuatif, namun pada dasarnya menunjukkan kecenderungan tren yang terus meningkat. Karena walaupun rasio eksport non migas tahun 2013 lebih kecil dibandingkan yang terjadi pada tahun 1997 dan

2000, namun tingginya rasio ekspor non migas tersebut bukan seutuhnya karena peningkatan ekspor melainkan juga karena dipengaruhi oleh melemahnya nilai tukar Indonesia terhadap dolar Amerika. Rupiah mengalami pelemahan hingga sekitar 100% dimana pada tahun 1996 hanya 2355 rupiah menjadi 4827 rupiah pada tahun 1997. Begitu juga pada tahun 2000, peningkatan rasio ekspor non migas dipengaruhi oleh melemahnya nilai tukar Indonesia terhadap dolar Amerika dari 7159 rupiah pada tahun 1999 menjadi 9595 rupiah pada tahun 2000. Hal yang sama juga terjadi pada perkembangan nilai dan rasio impor non migas Indonesia.

Perkembangan ekspor dan impor Indonesia juga dipaparkan dalam Laporan Hasil Kajian-*Free Trade Area (FTA)* dan *Economic Partnership Agreement (EPA)*, dan Pengaruhnya terhadap Arus Perdagangan dan Investasi dengan Negara Mitra oleh Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral (2013: 133) bahwa:

Terjadi kenaikan volume perdagangan baik ekspor dan impor sebesar 2,5 kali lipat untuk ekspor dan 4,5 kali lipat untuk impor dari tahun 2000 ke tahun 2010. Dampaknya surplus neraca perdagangan mengalami penurunan terutama semenjak tahun 2008, walaupun masih ada tendensi kenaikan tipis.

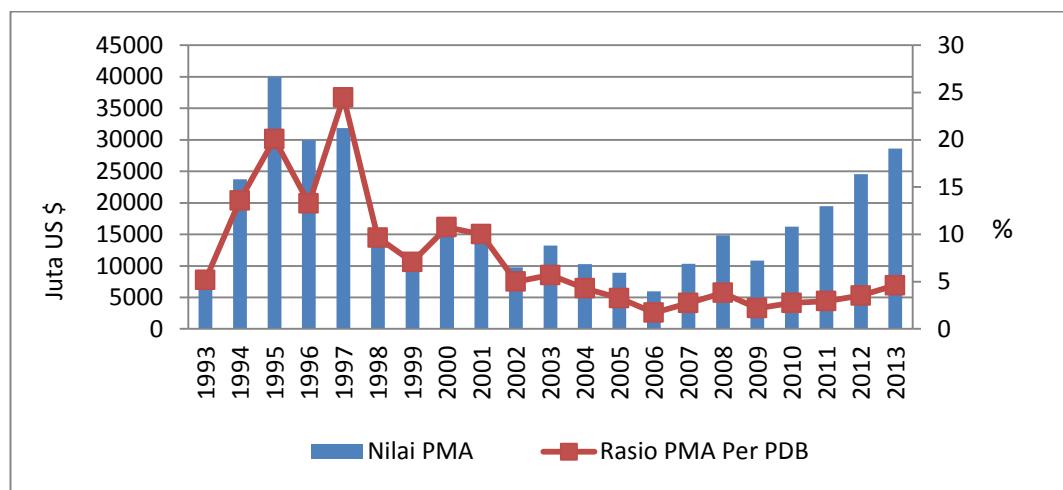
Selain keterbukaan ekonomi dari sisi perdagangan, Indonesia juga memberikan akses pada keterbukaan dari sisi finansial. Awal tonggak keterbukaan finansial Indonesia terjadi pada tahun 1967 dimana presiden Soeharto menerbitkan Undang-Undang No.1 tentang Penanaman Modal Asing. Pada tahun itu pula, konsensi pertambangan emas di Papua untuk Freeport McMoran diberikan. Setahun kemudian melalui UU No. 6 tentang Penanaman Modal Dalam

Negeri, modal asing diperbolehkan masuk ke 7 sektor yang sebelumnya tidak boleh dikuasai asing (pelabuhan, kelistrikan, telekomunikasi, pelayaran, penerbangan, air minum, kereta api umum, pembangkit tenaga atom, dan media masa) dengan persyaratan saham asing tidak lebih dari 49 persen. Kebijakan ini kemudian meningkat pada tahun 1974, pihak asing dapat menguasai saham hingga 75 persen pada 7 sektor tersebut. Dan kembali meningkat melalui Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1994, investor asing dapat memiliki saham hingga 95 persen. Satu-satunya yang masih dilindungi dari modal asing adalah usaha media masa melalui UU No. 4 tahun 1982. (Laksono, 2009: 217-218). Kemudian pada tahun 2007 kebijakan yang dianggap paling liberal muncul melalui UU No. 25 tahun 2007 yang oleh Kwik Kian Gie (dalam Laksono, 2009: 221) disaring menjadi sebagai berikut:

1. Tidak ada lagi perbedaan antara modal asing dan modal dalam negeri (pasal 1)
2. Pemerintah memberikan perlakuan yang sama kepada semua penanaman modal yang berasal dari negara manapun (pasal 6)
3. Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi atau pengambilalihan hak kepemilikan penanaman modal, kecuali dengan undang-undang (pasal 7)
4. Investor diberi hak untuk melakukan transfer dan repatriasi dalam valuta asing, yang berarti membolehkan investor asing memindahkan keuntungan dari Indonesia ke negara asal (pasal 8)
5. Semua bidang usaha boleh dimasuki kecuali senjata dan usaha-usaha lain yang secara eksplisit dilarang oleh Undang-undang (pasal 12)
6. Hak atas tanah menjadi 95 tahun untuk HGU (Hak Guna Usaha), menjadi 80 tahun untuk HGB (Hak Guna Bangunan), dan menjadi 70 tahun untuk Hak Pakai.

Serangkaian kebijakan tersebut berdampak terhadap aliran penanaman modal asing (PMA) yang masuk ke Indonesia. Seperti yang terlihat pada grafik 2, nilai penanaman modal asing sebelum krisis ekonomi 1998 sangat tinggi.

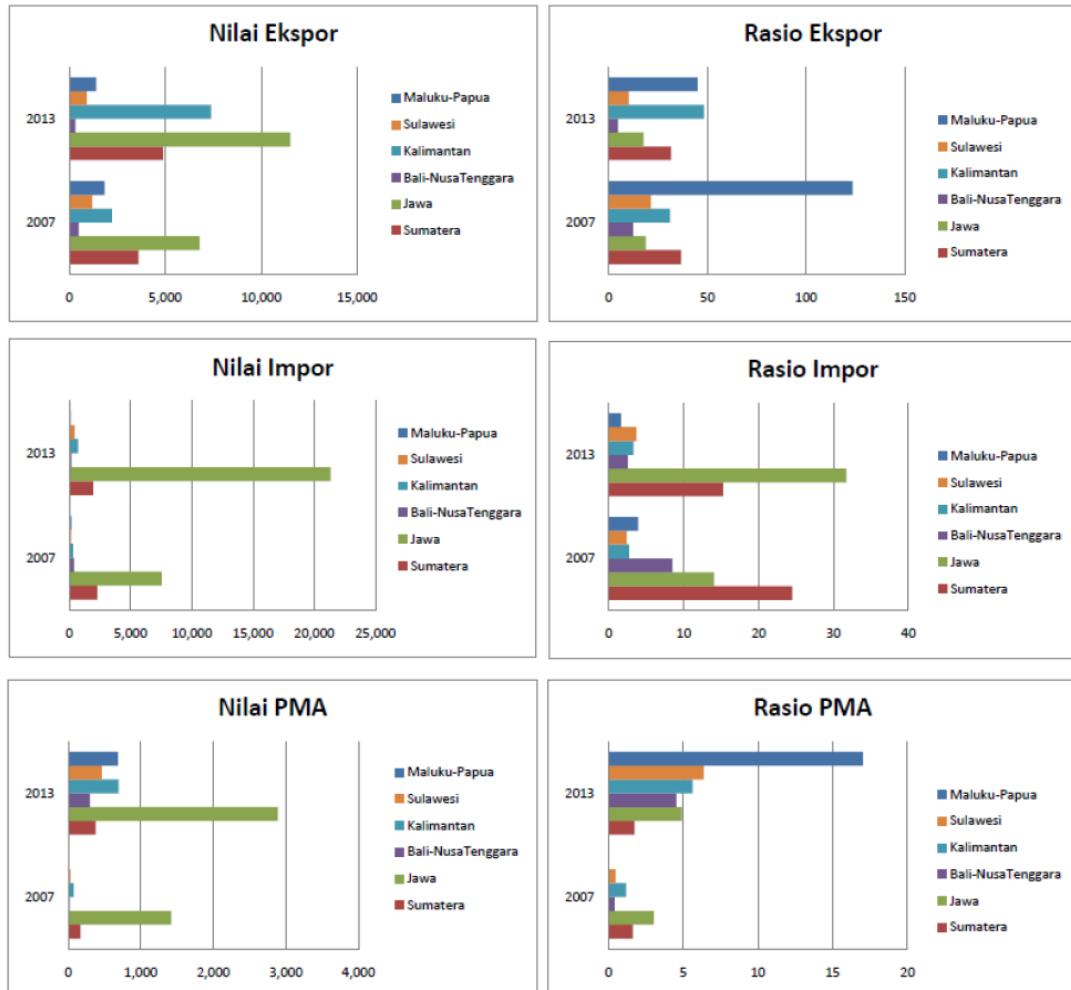
Meskipun pada akhirnya krisis ekonomi tahun 1998 menurunkan minat investor asing untuk menanamkan modalnya ke Indonesia seperti yang terlihat pada grafik 2 bahwa terjadi penurunan tajam dari tahun 1998 hingga tahun 2006. Hingga kemudian setelah terbit UU. No 25 tahun 2007, arus penanaman modal asing kembali meningkat tajam dan cenderung konsisten hingga tahun 2013 meskipun sempat terjadi penurunan pada tahun 2009 karena krisis ekonomi global. Meskipun apabila dilihat berdasarkan rasio terlihat sangat rendah namun menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat dari tahun 2007 hingga 2013.



Sumber: Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id)

Grafik 2. Penanaman Modal Asing (PMA) Indonesia Tahun 1993-2013

Baik keterbukaan perdagangan maupun finansial menunjukkan tren peningkatan yang konsisten sejak tahun 2007, hanya terjadi penurunan pada tahun 2009 sebagai akibat krisis ekonomi global. Namun, apabila dikaji berdasarkan provinsi ternyata tidak semua wilayah mengalami perkembangan keterbukaan ekonomi tersebut. Berikut perkembangan keterbukaan eksport-impor penanaman modal asing rata-rata provinsi per pulau di Indonesia:



Sumber: Bank Indonesia, Badan Koordinasi Penanaman Modal Asing, dan Badan Pusat Statistik (diolah)

Grafik 3. Nilai dan Rasio Ekspor-Impor-Penanaman Modal Asing Rata-rata Provinsi Per Pulau Tahun 2007 dan 2013

Berdasarkan grafik 3, terlihat bahwa peningkatan keterbukaan ekspor hanya terjadi pada rata-rata provinsi di pulau Kalimantan, sementara peningkatan keterbukaan impor terjadi pada rata-rata provinsi di pulau Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata provinsi di pulau Sumatera, pulau Bali-Nusa Tenggara, pulau Maluku dan Papua justru cenderung mengalami penurunan keterbukaan eksport-impor. Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan

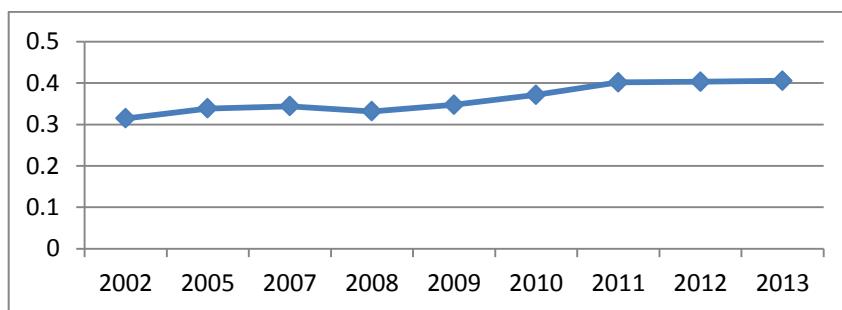
Selatan menjadi provinsi dengan tingkat keterbukaan ekspor tertinggi pada tahun 2013. Sementara provinsi dengan tingkat keterbukaan impor tertinggi terjadi pada provinsi Kepulauan Riau dan Banten.

Berbeda dengan kerterbukaan perdagangan, peningkatan keterbukaan finansial terjadi pada seluruh pulau di Indonesia. Hanya provinsi Riau, Sumatera Barat, Jambi, Bangka Belitung, Lampung dan DKI Jakarta yang mengalami penurunan keterbukaan modal asing, dengan tingkat penurunan yang sangat rendah. Penurunan yang cukup tinggi hanya terjadi pada provinsi Lampung dan DKI Jakarta.

Melihat perkembangan keterbukaan ekonomi berdasarkan provinsi, terlihat bahwa perkembangan keterbukaan perdagangan hanya terjadi pada provinsi-provinsi tertentu. Sementara peningkatan keterbukaan finansial merata terjadi di hampir seluruh provinsi di Indonesia.

Lebih lanjut Indonesia bersama negara-negara yang tergabung dalam ASEAN terus mengupayakan peningkatan keterbukaan ekonomi di kawasan mereka hingga akhirnya tercetuslah *Asean Economic Community (AEC)* yang akan segera terlaksana pada akhir tahun 2015 ini. AEC sendiri merupakan langkah lanjut dari *AFTA*, namun sedikit berbeda dengan *AFTA* yang hanya menekankan pada kebebasan perdagangan, *AEC* benar-benar seutuhnya ingin menciptakan kawasan ekonomi bebas di seluruh negara anggota ASEAN dimana harapannya nanti barang, jasa, investasi, modal, dan juga tenaga kerja terampil akan bergerak bebas di kawasan ini.

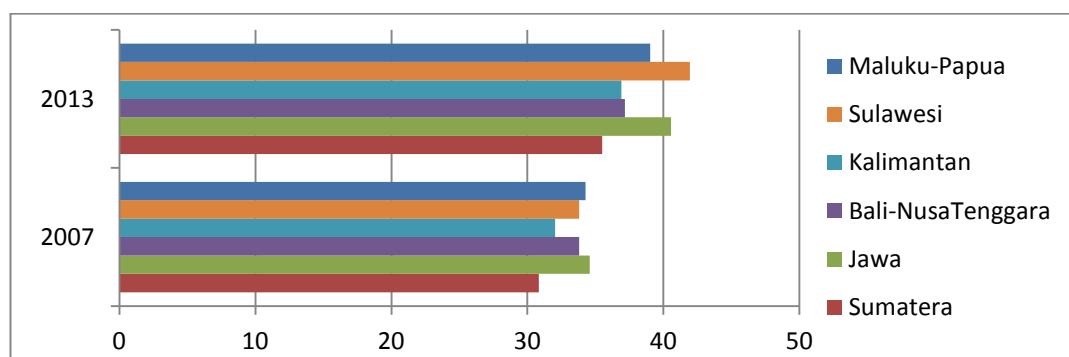
Keterbukaan Ekonomi baik dari sisi perdagangan dan finansial yang diupayakan pemerintah Indonesia tersebut harapannya akan mampu menciptakan kesejahteraan pada seluruh masyarakat Indonesia, seperti konsep *general welfare* yang diusung Adam Smith. Akan tetapi harapan tercapainya kesejahteraan dengan mengupayakan keterbukaan ekonomi terancam pupus melihat kondisi ketimpangan pendapatan di Indonesia yang tidak menunjukkan tren penurunan namun justru cenderung mengalami peningkatan.



Sumber: Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id)

Grafik 4. Indeks Gini Indonesia Tahun 2002-2013

Peningkatan ketimpangan pendapatan Indonesia ternyata disebabkan oleh peningkatan ketimpangan pendapatan di hampir seluruh provinsi di Indonesia. Hanya provinsi Maluku Utara yang mengalami penurunan ketimpangan pendapatan tahun 2013 dibanding tahun 2007.



Sumber: Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id)

Grafik 5. Indeks Gini Rata-rata Provinsi Per Pulau di Indonesia Tahun 2007 dan 2013

Fakta kecenderungan peningkatan ketimpangan pendapatan ini mengingatkan pada adanya dua pendapat yang berlaianan tentang pengaruh keterbukaan ekonomi terhadap ketimpangan. Menurut kaum neoklasik keterbukaan perdagangan akan mendorong pemerataan pendapatan sebagaimana pendapat Heckscher-Ohlin (Krugman dan Obstfeld, 2004: 95). Di lain sisi ada ekonom yang memiliki pandangan diluar *main-strem economics* seperti halnya kaum klasik dan neoklasik, kaum ini seringkali disebut kaum anti neoklasik atau pengikut ilmu ekonomi radikal, mereka berpandangan bahwa keterbukaan perdagangan ini justru dapat meningkatkan ketimpangan pendapatan. (Boediono, 1997: 73).

Tidak berbeda dengan keterbukaan perdagangan, dalam keterbukaan finansial juga terdapat perbedaan pendapat mengenai dampak keterbukaan finansial bagi *host country*. Teori ekonomi neoklasik menyatakan bahwa investasi asing langsung atau *foreign direct investment (FDI)* memiliki kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi *host country*. Sementara teori ketergantungan atau *dependency theory* secara diametral berlawanan dengan teori neoklasik, teori ini menyatakan bahwa *FDI* tidak menimbulkan makna apa pun bagi pembangunan ekonomi di *host country*, keberadaan *FDI* justru menindas pertumbuhan dan menimbulkan ketidakseimbangan pendapatan di *host country*. (Ardiansyah, 2014)

Berdasarkan uraian diatas, Indonesia mengalami perkembangan yang cukup tinggi dalam keterbukaan ekonomi baik dari sisi perdagangan dan sisi finansial, namun ketimpangan pendapatan tidak mengalami penurunan bahkan cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Terlebih sebentar lagi

Indonesia akan memasuki era *AEC* yang sudah pasti akan semakin meningkatkan keterbukaan ekonomi seluruh provinsi di Indonesia. Oleh karena itu menarik untuk mengetahui bagaimana sebenarnya pengaruh keterbukaan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia?

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang tersebut ditemukan beberapa permasalahan yang dapat didentifikasi antara lain:

1. Ketimpangan pendapatan di provinsi-provinsi di Indonesia cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun
2. Adanya perbedaan pendapat mengenai dampak keterbukaan perdagangan terhadap ketimpangan pendapatan
3. Adanya perbedaan pendapat mengenai dampak keterbukaan finansial terhadap ketimpangan pendapatan

C. Batasan Masalah

Masalah pengaruh keterbukaan ekonomi terhadap ketimpangan distribusi pendapatan sangatlah luas, oleh karena itu dalam melakukan penelitian dibutuhkan batasan agar tidak terlalu luas. Batasan dalam penelitian ini adalah mengukur keterbukaan ekonomi hanya dengan keterbukaan perdagangan dan keterbukaan finansial. Keterbukaan perdagangan dilihat dari perbandingan ekspor per PDRB dan impor per PDRB dimana ekspor dan impor juga dibatasi hanya non migas saja. Selain itu dalam penelitian ini ketimpangan pendapatan hanya diukur

dengan indeks gini dan membatasi data yang digunakan dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2013 pada 29 provinsi di Indonesia.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Keterbukaan Ekspor terhadap Ketimpangan Pendapatan di Tingkat Provinsi di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh Keterbukaan Impor terhadap Ketimpangan Pendapatan di Tingkat Provinsi di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh Keterbukaan Penanaman Modal Asing (PMA) terhadap Ketimpangan Pendapatan di Tingkat Provinsi di Indonesia?

E. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaruh Keterbukaan Ekspor terhadap Ketimpangan Pendapatan di Tingkat Provinsi di Indonesia
2. Mengetahui pengaruh Keterbukaan Impor terhadap Ketimpangan Pendapatan di Tingkat Provinsi di Indonesia
3. Mengetahui pengaruh Keterbukaan Penanaman Modal Asing (PMA) terhadap Ketimpangan Pendapatan di Tingkat Provinsi di Indonesia

F. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan dalam mengambil kebijakan terkait keterbukaan ekonomi untuk mencapai kesetaraan pendapatan seluruh penduduk Indonesia
2. Bagi masyarakat umum, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengaruh keterbukaan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan, sehingga dapat menjadi pedoman dalam menghadapi era globalisasi.
3. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan dan pertimbangan bagi peneliti berikutnya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Ketimpangan Pendapatan

a. Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan merupakan wujud bahwasanya distribusi pendapatan yang didapatkan oleh masyarakat pada suatu negara tidaklah sama. Ketimpangan pendapatan sendiri sebenarnya merupakan fenomena yang hampir terjadi di seluruh negara, baik itu negara miskin, negara sedang berkembang, maupun negara maju, yang membedakan hanyalah besaran dari tingkat ketimpangan pendapatannya.

John Rawls (dalam Todaro dan Smith, 2006: 236), seorang filsuf mengajukan sebuah eksperimen pikiran dimana menurutnya sebagian besar orang akan memilih negara dengan tingkat ketimpangan pendapatan tertentu. Hal ini dikarenakan setiap orang pada dasarnya tidak mau berada di posisi orang termiskin dengan kondisi tingkat ketimpangan pendapatan yang tinggi, namun apabila terjadi pemerataan yang sempurna (setiap orang memiliki pendapatan yang sama) maka dorongan untuk bekerja keras atau berinovasi akan hilang.

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwasanya suatu negara tidak harus mencapai pemerataan pendapatan yang sempurna untuk mensejahterakan seluruh masyarakatnya, melainkan tugas negara

adalah mengendalikan tingkat ketimpangan pendapatan masyarakatnya hingga tingkat serendah mungkin namun bukan 0. Negara bisa mengendalikan tingkat ketimpangan pendapatannya melalui pengendalian faktor-faktor yang menjadi penyebab tingkat ketimpangan pendapatan.

b. Teori Ketimpangan Pendapatan

Adelman & Morris (dalam Arsyad, 283-284) mengemukakan bahwa ada delapan penyebab ketidakmerataan distribusi pendapatan di Negara Sedang Berkembang (NSB), yaitu:

1. Pertambahan penduduk yang tinggi akan memicu penurunan pendapatan per kapita
2. Inflasi dimana pendapatan atas uang bertambah namun tidak diikuti secara proposional oleh pertambahan produksi barang-barang
3. Ketidakmerataan pembangunan antardaerah
4. Investasi yang sangat banyak dalam proyek-proyek yang padat modal (*capital intensive*) sehingga persentase pendapatan yang berasal dari kerja, sehingga angka pengangguran pun bertambah
5. Rendahnya mobilitas sosial
6. Pelaksanaan kebijakan industri substitusi impor yang mengakibatkan kenaikan pada harga barang-barang hasil industri guna melindungi usaha-usaha kapitalis
7. Memburuknya nilai tukar (*term of trade*) bagi NSB dalam perdagangan dengan negara-negara maju, sebagai akibat adanya ketidakelastisan permintaan terhadap barang-barang ekspor NSB

8. Hancurnya industri-industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga, dan lain-lain

c. Pengukuran Ketimpangan Pendapatan

Distribusi pendapatan sebagai suatu ukuran dibedakan menjadi dua ukuran pokok, baik untuk tujuan analisis maupun untuk tujuan kuantitatif (dalam Todaro dan Smith, 2006: 234), yaitu:

1. Distribusi pendapatan perseorangan atau distribusi ukuran pendapatan

Sistem distribusi ini paling banyak digunakan ahli ekonomi.

Ukuran ini secara langsung menghitung jumlah penghasilan yang diterima oleh setiap individu atau rumah tangga sementara sumber pendapatannya diabaikan. Kemudian membagi total populasi menjadi sejumlah kelompok atau ukuran sesuai dengan tingkat pendapatan yang diterima lalu menetapkan berapa proporsi yang diterima oleh masing-masing kelompok dari pendapatan nasional total.

2. Distribusi pendapatan fungsional atau pangsa distribusi pendapatan per faktor produksi

Sistem distribusi ini berfokus pada pendapatan nasional total yang diterima oleh masing-masing faktor produksi (tanah, tenaga kerja, dan modal) dan pada dasarnya mempersoalkan presentase penghasilan tenaga kerja secara keseluruhan serta membandingkan dengan presentase pendapatan total yang dibagikan dalam bentuk sewa, bunga, dan laba.

Ada tiga alat ukur tingkat ketimpangan pendapatan, yaitu Rasio Kuznet, Kurva Lorenz, dan Koefisien Gini. Rasio Konsentrasi Gini atau yang sederhananya disebut Koefisien Gini dirumuskan pertama kali oleh ahli statistik Italia pada tahun 1912. Menurut Arsyad (2010: 290-291), koefisien Gini adalah suatu ukuran yang singkat mengenai derajat ketidakmerataan distribusi pendapatan dalam suatu negara. Koefisien gini ini merupakan ukuran ketidakmerataan agregat yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna).

Adapun tingkat ketimpangan pendapatan berdasarkan Koefisien Gini adalah sebagai berikut (Arsyad, 2010: 291):

Tabel 1. Tingkat Ketimpangan Pendapatan

Tingkat Ketimpangan	Keterangan
0.50 – 0.70	Ketimpangan Tinggi
0.36 – 0.49	Ketimpangan Sedang
0.20 – 0.35	Ketimpangan Rendah

Secara matematis rumus koefisien Gini adalah sebagai berikut (Arsyad, 2010: 290):

$$\mathbf{KG} = \mathbf{1} - \sum_{i=1}^n (X_{i+1} - X_i)(Y_{i+1} - Y_i)$$

Keterangan:

- KG = Koefisien Gini
- X_i = Proporsi jumlah rumah tangga kumulatif dalam kelas i
- f_i = Proporsi jumlah rumah tangga dalam kelas i
- Y_i = Proporsi jumlah pendapatan rumah tangga kumulatif dalam kelas i

2. Perdagangan Internasional

a. Definisi Perdagangan Internasional

Perdagangan internasional merupakan suatu cerminan dari negara yang menganut sistem perekonomian terbuka. Negara yang menganut sistem perekonomian terbuka akan membuka diri atas kegiatan ekonomi antara masyarakat domestik dan masyarakat luar.

Perdagangan diartikan sebagai proses tukar-menukar yang didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing pihak (Boediono, 1997: 10). Kehendak untuk melakukan perdagangan muncul karena adanya motif berdagang, yaitu untuk mendapatkan manfaat atau keuntungan dari perdagangan (*gains from trade*). Sementara pertukaran yang terjadi karena paksaan, ancaman perang dan sebagainya tidak termasuk dalam arti perdagangan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya perdagangan internasional adalah proses pertukaran antar negara yang terjadi secara sukarela untuk mendapatkan manfaat atau keuntungan.

b. Teori Perdagangan Internasional

Gagasan mengenai pentingnya perdagangan internasional bagi perekonomian suatu negara diusung pertama kali oleh Adam Smith melalui tulisannya pada tahun 1776, Smith menyatakan bahwa “pembagian tenaga kerja dibatasi oleh besarnya pasar”. Semakin besar pasar yang menjadi tujuan pemasaran barang dan jasanya, semakin besar pula keuntungan yang diperoleh dari perdagangan dan pembagian tenaga kerja. (Todaro dan Smith, 2006: 81). Ada cukup banyak ekonom yang mengungkapkan teori tentang

perdagangan internasional, diantaranya adalah teori klasik (Adam Smith, David Ricardo) dan teori neoklasik (Haberler dan Hecksher-Ohlin). Selain itu Boediono (1997: 72-73) juga menjelaskan tentang pandangan lain dari perdagangan Internasional atau yang sering kali disebut Ilmu Ekonomi Radikal

1) Teori Keunggulan Mutlak (*Absolute Advantage*) dari Adam Smith

Adam Smith menjelaskan bahwa perdagangan internasional dapat menguntungkan kedua belah pihak apabila masing-masing negara lebih mengkonsentrasi diri untuk memproduksi barang-barang yang mempunyai keunggulan mutlak dan kemudian mengeksport kelebihan barang yang diproduksinya kepada mitra dagangnya. Hal ini terjadi karena perbedaan faktor produksi yang dimiliki setiap negara menyebabkan suatu negara bisa lebih efisien dalam menghasilkan suatu barang dibandingkan negara lain.

2) Keunggulan Komparatif (*Comparitive Advantage*) dari David Ricardo

Teori Keunggulan Komparatif David Ricardo muncul sebagai penyempurnaan teori keunggulan mutlak Adam Smith. David Ricardo menyatakan bahwa yang menentukan tingkat keuntungan dalam perdagangan internasional bukan berasal dari keunggulan mutlak melainkan dari keunggulan komparatif. Ricardo (dalam Boediono, 1997: 22) menyatakan bahwa suatu negara yang tidak memiliki keunggulan mutlak pun bisa melakukan ekspor selama negara tersebut

memiliki harga relatif dalam negeri yang lebih tinggi dibanding negara lain (keunggulan komparatif).

Spesialisasi produksi yang dilakukan setiap negara atas produk yang diungguli secara komparatif dan terjadinya perdagangan bebas tanpa hambatan akan menciptakan efisiensi dalam penggunaan faktor-faktor produksi, dan akan menciptakan harga relatif keseimbangan yang memberikan keuntungan pada kedua belah pihak yang kemudian akan menggeser Kurva Kemungkinan Konsumsi (*Consumption Possibility Frontier atau CPF*) ke atas yang artinya kemampuan konsumsi barang-barang dari negara tersebut meningkat. Tingkat konsumsi suatu negara tidak lagi sama dengan tingkat produksi, melainkan bisa lebih tinggi dari tingkat produksi negara tersebut. Sehingga produksi dunia secara keseluruhan akan mencapai maksimum yang akan berdampak pada meningkatnya kemakmuran.

3) Keunggulan Komparatif (*Comparative Advantage*) dari Haberler

Berbeda dengan teori klasik yang melihat perbedaan biaya produksi suatu barang yang sama hanya dari pemakaian tenaga kerja, maka Haberler mengatakan bahwa harga barang di pasaran bukan hanya disebabkan pemakaian faktor produksi tenaga kerja tetapi merupakan kombinasi pemakaian faktor produksi (tanah, tenaga kerja, dan kapital). Oleh karena itu Haberler menggunakan konsep *opportunity cost* yang dijelaskan dengan *possibility curve* dan *indifference curve* untuk melihat terjadinya perdagangan antar dua

negara serta melihat keuntungan dari perdagangan internasional yang terjadi.

- 4) Keunggulan Komparatif (*Comparative Advantage*) dari Hescher-Ohlin (H-O)

Menurut teori Heckscher-Ohlin atau teori H-O (dalam Apridar, 2012: 102), perdagangan antar negara dapat terjadi karena:

Adanya perbedaan jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki (*endowment factors*) masing-masing negara. Negara-negara yang memiliki faktor produksi yang relatif banyak/ murah dalam memproduksinya akan melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang tersebut. Sebaliknya, masing-masing negara akan mengimpor barang tertentu jika negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif langka/ mahal dalam memproduksinya.

Dengan adanya spesialisasi dan pembagian kerja antara negara berkembang dan negara maju dalam perdagangan internasional, maka diharapkan masing-masing negara akan mendapatkan keuntungan perdagangan yang optimal.

Selain menjelaskan mengenai faktor yang mendorong terjadinya perdagangan antar negara, Heckcher-Ohlin juga menjelaskan kaitan perdagangan internasional dengan distribusi pendapatan. Menurut Heckcher-Ohlin (dalam Krugman dan Obstfeld, 2004: 95) perdagangan internasional akan membuat para pemilik faktor-faktor produksi yang melimpah di suatu Negara akan memeroleh keuntungan dari adanya hubungan perdagangan, namun para pemilik faktor-faktor produksi yang langka di suatu Negara sebaliknya akan mengalami kerugian dari terselenggaranya perdagangan. Dengan demikian tingkat ketimpangan

pendapatan antara pemilik faktor-faktor produksi langka dan melimpah di suatu Negara bisa menurun.

5) Pandangan Ilmu Ekonomi Radikal

Teori Klasik dan Modern yang telah diuraikan merupakan teori atau pandangan mengenai perdagangan internasional dari para ekonom yang tergolong mayoritas atau seringkali disebut “*main-stream economics*”. Namun diluar dari pandangan tersebut, ada pandangan lain mengenai perdagangan internasional atau yang seringkali disebut ilmu ekonomi radikal (*radical economics*). Pandangan ini menekankan aspek-aspek yang terlupakan dalam analisis *main-stream economics*, yaitu mengenai aspek kelembagaan, perbedaan kekuatan ekonomi dari para pelaku ekonomi, aspek yang bersifat ekonomis-politis dan melihat kesemuanya sebagai proses sejarah. (Boediono, 1997: 73)

Pemikiran kaum ilmu ekonomi radikal berkebalikan dengan pemikiran kaum ekonomi Neoklasik, sehingga seringkali juga disebut kaum Anti Neoklasik. Salah satu perbedaan pemikiran mereka terletak pada dampak perdagangan terhadap ketimpangan pendapatan. Kaum Neoklasik berpendapat perdagangan dapat memeratakan distribusi pendapatan sementara kaum anti Neoklasik justru berpendapat perdagangan akan meningkatkan ketimpangan pendapatan.

Menurut pandangan ilmu ekonomi radikal (dalam Boediono, 1997: 73) selalu terdapat perbedaan kekuatan ekonomi pihak-pihak yang melakukan perdagangan, ketidakseimbangan ini akan

menimbulkan ketidakmerataan pembagian manfaat dari perdagangan.

Satu pihak memeroleh bagian terbesar atau seluruh manfaat sementara pihak lain hanya memeroleh bagian kecil atau tidak sama sekali.

3. Investasi Asing Langsung

a. Definisi Investasi Asing Langsung

Investasi menurut Fitzgerald (dalam Salim dan Sutrisno, 2008: 31) adalah suatu aktivitas yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber-sumber (dana) yang dipakai untuk mengadakan barang modal pada saat sekarang dan dengan barang modal tersebut akan dihasilkan aliran produk baru di masa yang akan datang. Sementara menurut Kamaruddin Ahmad (dalam Salim dan Sutrisno, 2008: 32), investasi adalah menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut. Berdasarkan kedua definisi tersebut, Salim dan Budi Sutrisno (2008:33) kemudian memberikan definisi yang lebih menyeluruh dimana investasi adalah penanaman modal yang dilakukan oleh investor, baik investor asing maupun domestik, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa investasi asing adalah penanaman sumber-sumber dana yang dilakukan investor asing yang dipakai untuk mengadakan barang modal pada bidang usaha yang terbuka untuk investasi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.

Apabila dilihat dari bentuknya, investasi asing dapat dibedakan menjadi investasi portofolio dan investasi langsung. (Salim dan Sutrisno,

2008: 38). Investasi asing langsung dalam Undang-Undang di Indonesia lebih dikenal dengan istilah penanaman modal asing. Pengertian penanaman modal asing tercantum dalam UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dimana dalam UU tersebut dijelaskan bahwa penanaman modal asing hanyalah meliputi penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan UU dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung risiko dari penanaman modal tersebut.

b. Teori Investasi Asing Langsung

Pada tahun 2008, Muchammad Zaidun dalam orasi ilmiahnya mengemukakan teori-teori yang berkaitan dengan kepentingan negara dalam bidang investasi, tinjauanya adalah dari sudut pandang kepentingan pembangunan ekonomi, yaitu melihat segi kepentingan ekonomi yang menjadi dasar pertimbangan perumusan kebijakan. Oleh karena itu lazim untuk meminjam teori-teori ekonomi pembangunan sebagai dasar pijakan hukum investasi yang cukup popular, antara lain (Ardiansyah, 2014):

1) Teori Ekonomi Neoklasik/ *Neo-Classical Economic Theory*

Teori ini berpendapat bahwa penanaman modal asing/ *foreign direct investment (FDI)* memiliki kontribusi yang positif terhadap pembangunan ekonomi *host country*. Modal asing yang dibawa ke *host country* akan digunakan untuk berbagai usaha sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional. Teori ini

memandang bahwa investasi asing secara keseluruhan bermanfaat atau menguntungkan *host country*.

2) Teori Ketergantungan/ *Dependency Theory*

Teori ini secara diametral berlawanan dengan teori ekonomi neoklasik dengan berpendapat bahwa *foreign investment* tidak menimbulkan makna apa pun bagi pembangunan ekonomi di *host country*. Mereka berpendapat bahwa *foreign investment* menindas pertumbuhan ekonomi dan menimbulkan ketidakseimbangan pendapatan. Teori ini berpendapat bahwa *foreign direct investment* sebagai ancaman terhadap kedaulatan *host country* dan terhadap kebebasan pembangunan kehidupan sosial dan budaya karena investasi asing cenderung memperluas yurisdiksi menggunakan pengaruh kekuatan pemerintah asing terhadap *host country* sehingga pengaruh politik investasi asing terhadap *host country* cukup besar.

3) Teori Jalan Tengah/ *The Middle Path Theory*

Banyak negara berkembang mengembangkan regulasi antara lain mengatur perizinan dan pemberian insentif melalui kebijakan investasi. Menurut teori ini investasi asing memiliki aspek positif dan aspek negatif terhadap *host country*, karena itu *host country* harus hati-hati dan bijaksana. Kehati-hatian dan kebijaksanaan dapat dilakukan dengan mengembangkan kebijakan regulasi yang adil.

4) Teori Intervensi Pemerintah/ *Government Intervention Theory*

Pendukung teori ini berpendapat, perlindungan terhadap *invant industries* di negara-negara berkembang dan kompetensi dengan industri di negara-negara maju merupakan hal yang esensial bagi pembangunan nasional. Teori ini melihat pentingnya peran negara yang otonom yang mengarahkan langkah kebijakan ekonomi termasuk investasi, peran negara dipercaya akan bisa mengintervensi pasar untuk mengoreksi ketimpangan pasar dan memberikan perlindungan kepada *invant industries*, kepentingan masyarakat, pengusaha domestik dan perlindungan lingkungan. Peran negara juga dapat memberi perlindungan bagi kepentingan para investor termasuk investor asing.

Berdasarkan teori-teori yang dipaparkan Muchammad Zaidun, terlihat bahwasanya *host country* membutuhkan keberadaan investasi asing bagi pembangunan ekonomi negaranya, akan tetapi seperti halnya *host country* yang memiliki kepentingan, investor asing tentunya juga memiliki kepentingan. Sebagai pelaku ekonomi jelas kepentingan investor asing adalah mencari keuntungan maksimal. Sehingga diperlukan kerjasama yang baik agar kepentingan masing-masing tidak merugikan kedua belah pihak.

Dalam kaitan investasi asing dan ketimpangan pendapatan, terdapat beberapa tulisan yang berusaha menganalisis hal tersebut, salah satunya tulisan karya Sadik dan Bolbol (2001). Tulisan Sadik dan Bolbol menjelaskan bahwasanya ada perbedaan tingkat upah yang diberikan perusahaan asing dengan perusahaan domestik sehingga akan memberikan kontribusi langsung

terhadap ketimpangan tingkat upah antar perusahaan. Selain perbedaan nilai upah, terdapat pula perbedaan komposisi pekerja di perusahaan asing dan perusahaan domestik. Perusahaan asing yang cenderung menggunakan teknologi maju cenderung lebih membutuhkan tenaga kerja terampil dibanding tenaga kerja tidak terampil. Oleh karena itu rata-rata tingkat pendidikan pekerja di perusahaan asing lebih tinggi daripada tingkat pendidikan pekerja di perusahaan domestik. Padahal masyarakat di negara berkembang mayoritas berkategori tenaga kerja tidak terampil. Dengan demikian akan semakin timpang pendapatan yang diterima antara tenaga kerja terampil dan tenaga kerja tidak terampil. (Simbolon, 2011).

B. Penelitian yang Relevan

Berikut beberapa penelitian empiris terdahulu yang memfokuskan studinya pada masalah keterbukaan ekonomi, dan ketimpangan pendapatan:

Tabel 2. Penelitian Relevan

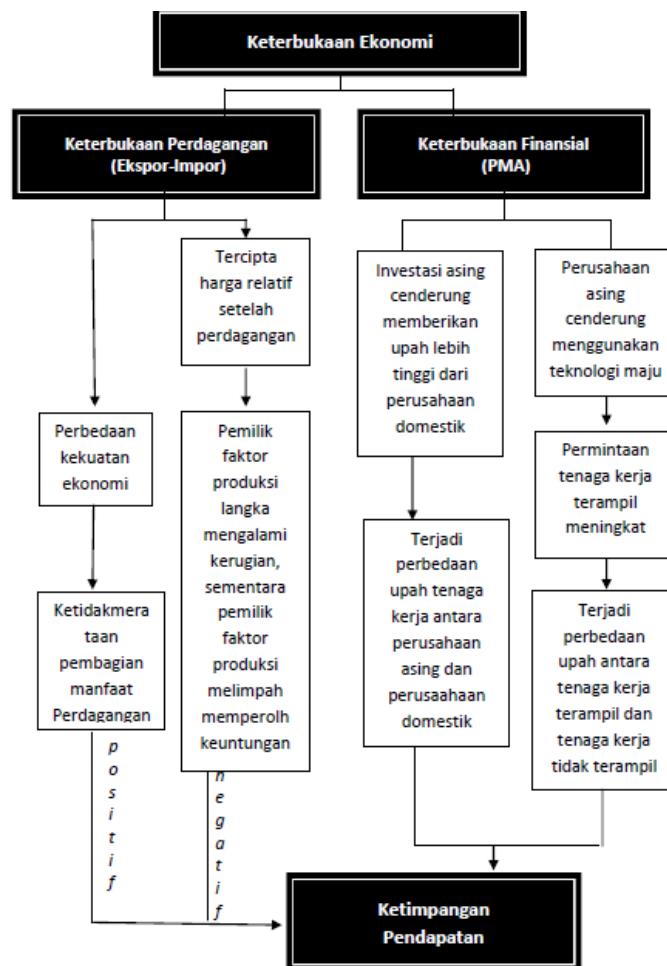
Peneliti	Ukuran Keterbukaan Ekonomi	Ukuran Ketimpangan Pendapatan	Sampel	Hasil
<i>Florence Jaumotte, Subir Lall, and Chris Papageorgio (IMF Economic Review Vol. 61, No.2, 2013)</i>	Keterbukaan Perdagangan (Ekspor/ GDP) dan (Impor/GDP) dan Keterbukaan Finansial (FDI/GDP)	Indeks Gini	Data Panel 51 negara pada tahun 1981 samapai 2003	Keterbukaan perdagangan (ekspor dan impor) tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, sementara keterbukaan finansial (fdi) berpengaruh secara signifikan terhadap ketimpangan pendapatan
Muradi	Keterbukaan	Indeks Gini	Data	Penanaman modal

<i>Rudy, Tesis UGM, 2014</i>	Perdagangan (Ekspor/ PDRB) dan (Impor/PDRB) dan Keterbukaan Finansial (FDI/PDRB)		panel 6 provinsi pada koridor ekonomi Sulawesi tahun 2007- 2012	asing/ FDI berpengaruh signifikan memperparah ketimpangan pendapatan , sementara ekspor berpengaruh signifikan mengurangi ketimpangan pendapatan
<i>Marie Daumal (Paper University Paris Dauphine, France, 2010)</i>	Keterbukaan Perdagangan (Ekspor+Impor /GDP)	Indeks Gini	Data Time Series 1980- 2004 di India, 1985- 2004 di Brazil	Keterbukaan ekonomi signifikan menurunkan ketidakmerataan pendapatan di Brazil namun meningkatkan ketidakmerataan di India
<i>Eunyoung Ha (The Journal of Politics, Vol. 74, No. 2, April 2012, Pp. 541-557)</i>	Keterbukaan Perdagangan (Ekspor+Impor /GDP) dan Keterbukaan Finansial (FDI/GDP)	Indeks Gini	Data panel 59 negara berkembang tahun 1975 sampai 2005	Keterbukaan perdagangan dan aliran FDI berpengaruh signifikan dalam memperluas ketimpangan pendapatan di Negara berkembang
<i>Branko Milanovic (The World Bank Economic Review, Vl. 19, No. 1, pp. 21- 44, 2005)</i>	Keterbukaan Perdagangan (Ekspor+Impor /GDP)	Indeks Gini dan Indeks Theil	<i>Unbalan ced panel Run Across 138 decile shres in 1988, 1993, end 1998</i>	Negara dengan level pendapatan rendah, orang kaya yang akan menikmati manfaat dari keterbukaan, tapi ketikan level pendapatan meningkat, pendapatan orang miskin dan menengah meningkat lebih tinggi daripada orang kaya
<i>Nova Murbarani (2013) Tesis</i>	Keterbukaan Perdagangan (Ekspor+Impor /PDRB)	Indeks Gini dan Indeks Wiliamson	Data panel 26 provinsi di	Keterbukaan Ekonomi memiliki pengaruh positif dan signifikan pada ketimpangan

UGM (2013)			Indonesia a tahun 1994- 2012	pendapatan di Indonesia- Hipotesis Kuznet (kurva U Terbalik berlaku di Indonesia)
---------------	--	--	---------------------------------------	---

C. Kerangka Pikir

Berdasarkan kajian pustaka yang telah diuraikan di atas, penulis berusaha menyusun kerangka berpikir dalam penelitian ini. Berikut kerangka berpikir pola hubungan keterbukaan ekonomi terhadap ketimpangan ekonomi:



Gambar 1. Kerangka Berpikir

D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kajian pustaka yang ada, maka penulis mencoba untuk merumuskan hipotesis yang akan diuji kebenarannya. Hipotesis dari penelitian ini adalah:

1. Keterbukaan Ekspor berpengaruh terhadap Ketimpangan Pendapatan di Tingkat Provinsi di Indonesia
2. Keterbukaan Impor berpengaruh terhadap Ketimpangan Pendapatan di Tingkat Provinsi di Indonesia
3. Keterbukaan Penanaman Modal Asing berpengaruh terhadap Ketimpangan Pendapatan di Tingkat Provinsi di Indonesia

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan suatu rencana tentang tata cara mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data secara sistematis dan terarah agar penelitian dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang berfungsi untuk mendeskripsikan data dalam bentuk angka atau persentase dan analisis ekonometri berupa regresi data panel. Data panel adalah data yang berstruktur urut waktu (*times series*) sekaligus *cross section* (Ariefianto. 2012: 148). Penelitian ini menggunakan panel seimbang (*balanced panel*), sebuah panel disebut seimbang jika masing-masing variabel memiliki jumlah observasi yang sama. Sementara jika masing-masing variabel memiliki jumlah yang berbeda maka disebut panel tidak seimbang (*unbalanced panel*). Penghitungan koefisien regresi dalam penelitian ini menggunakan *software Eviews 6* untuk menganalisis pengaruh keterbukaan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan.

B. Model Data Panel

Pada tahap pembentukan model, peneliti mengacu pada penelitian Jaumotte, et al (2013) yang meneliti tentang pengaruh keterbukaan perdagangan, keterbukaan finansial dan teknologi terhadap Ketimpangan Pendapatan. Berikut model dasar analisis empiris penelitian Jaumotte, et al (2013):

$$\ln(GINI)_{i-t} = \alpha(Trade\ Globalization\ Variabels)_{i-t} + \\ \beta(Financial\ Globalization\ Variabels)_{i-t} + \\ \square(Controls) + \eta_i + \theta_t + \varepsilon_{i-t}$$

Keterangan:

η_i = a full set of country dummies

θ_t = a full set of time dummies

ε_{i-t} = captures all the omitted factors

Jaumotte, et al (2013) membagi analisisnya menjadi 6 spesifikasi model, yaitu *summary model*, *full model*, *benchmark model*, sektoral *export*, sektoral *productivity*, dan *iv estimation*. Namun penelitian ini hanya akan mengacu pada spesifikasi *full model*, dan karena keterbatasan data yang tersedia maka terdapat perbedaan beberapa variabel yang digunakan sebagai berikut:

Tabel 3. Perbedaan Variabel dengan Full Model-Jaumotte, et al (2013)

Full Model – Jaumotte et all (2013)	Penelitian ini	Keterangan
Variabel Bebas		
Gini	✓	-
Variabel Terikat		
<i>Keterbukaan Perdagangan/ Trade Globalization</i>		
Rasio ekspor per PDB	✓	PDB dirubah menjadi PDRB
Rasio impor per PDB	✓	PDB dirubah menjadi PDRB
100 – tingkat tariff	-	Tarif ditentukan di tingkat nasional sehingga tidak ada perbedaan tarif pada tingkat provinsi
<i>Keterbukaan Finansial/ Financial Globalization</i>		
Rasio <i>inward</i> PMA per PDB	✓	PDB dirubah menjadi PDRB
Rasio <i>inward</i> investasi portofolio per PDB	-	Kesulitan dalam mendapatkan data
Rasio <i>inward</i> hutang per PDB	-	Kesulitan dalam mendapatkan data
Rasio <i>outward</i> PMA per PDB	-	Kesulitan dalam mendapatkan data
Indeks keterbukaan <i>capital account</i>	-	Tidak ada indeks keterbukaan <i>capital account</i> tingkat provinsi

Teknologi		
Rasio modal teknologi per total modal	-	Kesulitan dalam mendapatkan data
Variabel Kontrol		
Kredit di sektor privat per PDB	-	Kesulitan dalam mendapatkan data
Penduduk yang menempuh <i>Secondary education</i>	✓	-
Rata-rata lama sekolah	✓	-
Rasio tenaga kerja sektor agrikultur	✓	-
Rasio tenaga kerja sektor industri	✓	-

Selain itu, variabel *dummy* juga tidak digunakan dalam penelitian ini karena penelitian ini berbeda dengan penelitian Jaumotte yang menggunakan variabel *dummy* untuk melihat perbedaan pengaruh antara Negara maju dan Negara berkembang, sementara penelitian ini hanya menggunakan data di satu negara saja. Dengan demikian model yang akan digunakan dalam penelitian ini menjadi seperti berikut:

$$\text{GINI}_{i,t} = \beta_0 + \beta_1 \text{REKS}_{i,t} + \beta_2 \text{RIM}_{i,t} + \beta_3 \text{RPMA}_{i,t} + \beta_4 \text{APM}_{i,t} + \beta_5 \text{RLS}_{i,t} + \beta_6 \text{TKAGR}_{i,t} + \beta_7 \text{TKIND}_{i,t} + \varepsilon_{i,t}$$

Keterangan:

- GINI : tingkat ketimpangan pendapatan
- REKS : rasio ekspor per PDRB
- RIM : rasio impor per PDRB
- RPMA : rasio penanaman modal asing per PDRB
- APM : angka partisipasi murni
- RLS : rata-rata lama sekolah
- TKAGR : rasio tenaga kerja sektor agrikultur
- TKIND : rasio tenaga kerja sektor industri
- β : parameter
- i : provinsi yang diobservasi ($i = 1, \dots, N$)
- t : periode penelitian ($t = 1, \dots, T$)
- ε : error term

C. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder 29 provinsi di Indonesia dalam kurun waktu 2007-2013. Rentang waktu tahun 2007-2013 dipilih karena keterbatasan data indeks gini. Berikut adalah variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini:

Tabel 4. Variabel Penelitian

	Variabel	Keterangan	Simbol	Satuan	Sumber
Variabel Terikat	Ketimpangan Pendapatan	Indeks Gini	GINI	Persen	BPS
Variabel Bebas	Keterbukaan Perdagangan (Ekspor)	Ekspor non migas/ PDRB	REKS	Persen	BI dan BPS (diolah)
	Keterbukaan Perdagangan (Impor)	Impor non migas/ PDRB	RIM	Persen	BI dan BPS (diolah)
	Keterbukaan Finansial (PMA)	PMA/ PDRB	RPMA	Persen	BKPM dan BPS (diolah)
Variabel Kontrol	Angka Partisipasi Murni	Angka Partisipasi Murni Jenjang SMA	APM	Persen	BPS
	Rata-rata Lama Sekolah	Rata-rata Lama Sekolah	RLS	Tahun	Bappenas dan BPS
	Tenaga Kerja Sektor Agrikultur	Tenaga kerja sektor agrikultur/ jumlah tenaga kerja	TKAGR	Persen	BPS
	Tenaga Kerja Sektor Industri	Tenaga kerja sektor agrikultur/ jumlah tenaga kerja	TKIND	Persen	BPS

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Bank Indonesia (BI), Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), serta Data dan Informasi Kinerja Pembangunan yang diterbitkan Bappenas bekerjsama dengan BPS. Sedangkan

data kurs yang digunakan untuk mengkonversi PDRB menjadi US \$ berasal dari kurs transaksi tengah yang diambil dari Kalkulator Kurs Bank Indonesia.

D. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional dari variabel yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan dalam penelitian ini diartikan sebagai suatu keadaan dimana distribusi pendapatan yang diterima masyarakat di suatu negara tidak sama. Dalam penelitian ini, ketimpangan pendapatan diukur menggunakan indeks gini yang memiliki rentang nilai 0-1 atau rentang 0-100. Nilai 100 menunjukkan ketimpangan pendapatan sempurna dan nilai 0 menunjukkan pemerataan pendapatan sempurna.

2. Keterbukaan Perdagangan-Ekspor

Keterbukaan ekonomi dalam penelitian ini diartikan sebagai keterbukaan perdagangan dan keterbukaan finansial. Mengacu pada penelitian Jaumotte, et al (2013), pengukuran keterbukaan perdagangan dipisahkan menjadi dua, yaitu ekspor dan impor. Adapun variabel ekspor diukur dengan rumus (Ekspor/ PDRB). Data ekspor yang digunakan merupakan data ekspor non migas menurut produk provinsi yang dinyatakan dalam ribu US \$, diambil dari Kajian Ekonomi Regional-BI. Sementara PDRB merupakan PDRB atas dasar harga berlaku yang dinyatakan dalam

milyar rupiah yang kemudian dikonversikan ke ribu US \$ dengan kurs transaksi tengah yang diambil dari Kalkulator Kurs-BI.

3. Keterbukaan Perdagangan-Import

Mengacu pada penelitian Jaumotte, et al (2013), dalam penelitian ini keterbukaan perdagangan sisi impor diukur dengan rumus (Import/ PDRB). Data impor yang digunakan merupakan data impor non migas menurut produk provinsi yang dinyatakan dalam ribu US \$, diambil dari Kajian Ekonomi Regional-BI. Sementara PDRB merupakan PDRB atas dasar harga berlaku yang dinyatakan dalam milyar rupiah yang kemudian dikonversikan ke ribu US \$ dengan kurs transaksi tengah yang diambil dari Kalkulator Kurs-BI.

4. Keterbukaan Finansial-PMA

Keterbukaan finansial dalam penelitian ini hanya dilihat dari sisi penanaman modal asing. Mengacu pada penelitian Jaumotte, et al (2013), dalam penelitian ini keterbukaan finansial diukur dengan rumus (PMA/ PDRB). Data PMA yang digunakan merupakan data realisasi PMA yang dinyatakan dalam ribu US \$. Sementara PDRB merupakan PDRB atas dasar harga berlaku yang dinyatakan dalam milyar rupiah yang kemudian dikonversikan ke ribu US \$ dengan kurs transaksi tengah yang diambil dari Kalkulator Kurs-BI.

5. Angka Partisipasi Murni (APM)

APM dalam penelitian ini merupakan rasio antara jumlah siswa kelompok usia Sekolah Menengah Atas (16-18 tahun) dengan penduduk usia 16-18 tahun dan dinyatakan dalam persentase.

6. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

RLS dalam penelitian ini adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator RLS dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang dijalankan.

7. Tenaga Kerja Sektor Agrikultur

Menurut BPS, tenaga kerja sektor agrikultur adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu pada sektor agrikultur, dimana sektor agrikultur terdiri atas sub sektor pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan. Mengacu pada penelitian Jaumotte, et al (2013), dalam penelitian ini tenaga kerja sektor agrikultur diukur dengan rumus (jumlah tenaga kerja sektor agrikultur/ total tenaga kerja).

8. Tenaga Kerja Sektor Industri

Menurut BPS, tenaga kerja sektor industri adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selama seminggu yang lalu pada sektor industri pengolahan. Mengacu pada penelitian Jaumotte, et al (2013), dalam penelitian ini tenaga kerja sektor industri diukur dengan rumus (jumlah tenaga kerja sektor industri/ total tenaga kerja).

E. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah estimasi regresi data panel untuk mengukur pengaruh keterbukaan ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Guna mencapai tujuan penelitian, analisa data dalam penelitian ini akan dilakukan melalui model ekonometrika dengan bantuan program *Eviews 6*, adapun tahap-tahap analisis adalah sebagai berikut:

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum (Sugiyono, 2010: 29). Data akan dilihat dari rata-rata (*mean*), standar deviasi, nilai maksimal, dan nilai minimal.

2. Gambaran Perkembangan Variabel Penelitian

Gambaran perkembangan variabel penelitian berfungsi untuk mendeskripsikan perkembangan setiap variabel penelitian secara umum pada setiap provinsi.

3. Pemilihan Metode Estimasi Data Panel

Sebelum melakukan estimasi pada model perlu dilakukan pengujian untuk mengetahui metode yang terbaik. Menurut Widarjono (2007: 251), untuk melakukan estimasi parameter persamaan dengan data panel terdapat tiga teknik (metode) yang dapat dilakukan, yaitu:

Tabel 5. Metode Estimasi Data Panel

Metode	Keterangan
<i>Common Effect</i>	Mengabaikan adanya perbedaan dimensi individu maupun waktu (<i>intersep</i> dan <i>slope</i> dianggap sama/ konstan)
<i>Fixed Effect</i>	Mengasumsikan <i>intersep</i> dari setiap individu berbeda sedangkan <i>slope</i> antar individu tetap (sama)
<i>Random Effect</i>	Memperhitungkan bahwa <i>error</i> mungkin berkorelasi sepanjang <i>cross section</i> dan <i>time series</i>

Untuk menentukan metode yang paling tepat dari tiga jenis metode data panel, maka perlu dilakukan serangkaian uji, yaitu:

Tabel 6. Ketentuan Uji Penentuan Metode Estimasi Data Panel

Uji	Ho	Ha	Keretangan bila Ho Ditolak
<i>Chow Test</i> atau Likelihood Ratio	<i>Pooled Least Square</i>	<i>Fixed Effect</i>	Metode terpilih <i>fixed effect</i>
<i>Hausman test</i>	<i>Random Effect</i>	<i>Fixed Effect</i>	Metode terpilih <i>fixed effect</i>

4. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik diperlukan untuk mengetahui apakah model yang digunakan dalam penelitian ini telah sesuai dengan asumsi klasik atau belum, agar hasil model yang diestimasi tidak bias. Namun karena penelitian ini menggunakan data panel yang tidak wajib menggunakan uji asumsi klasik, maka penelitian ini tidak akan menggunakan semua uji asumsi klasik melainkan hanya akan menggunakan dua uji asumsi klasik. Adapun uji yang dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Uji Normalitas-Uji Jarque Bera

Uji normalitas diperlukan untuk melakukan pengujian variabel dengan mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal.

Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid dan statistik parametrik tidak dapat digunakan.

Uji Normalitas dapat dilihat dengan beberapa teknik, namun penelitian ini menggunakan Uji *Jarque-Bera*. Ketentuan Uji *JB* adalah sebagai berikut (Gujarati, 2010: 171):

H_0 : Residual terdistribusi secara normal

H_a : Residual tidak terdistribusi secara normal

Jika hasil dari *JB* statistik $> Chi\ Square$ tabel, maka H_0 ditolak

Jika hasil dari *JB* statistik $< Chi\ Square$ tabel, maka H_0 diterima

- b. Uji Multikolinieritas-Korelasi Berpasangan yang Tinggi Antar Variabel Bebas

Multikolinieritas adalah suatu keadaan dimana terjadi korelasi linier yang *perfect* atau eksak diantara variabel bebas. Jika terdapat korelasi yang sempurna diantara sesama variabel-variabel bebas sehingga nilai koefisien korelasi diantara sesama variabel bebas ini sama dengan 1 atau mendekati 1, maka konsekuensinya adalah:

- Nilai koefisien regresi menjadi tidak dapat ditaksir
- Nilai standard *error* setiap koefisien regresi menjadi tak hingga

Menurut Gujarati (2010: 429) multikolinieritas menjadi masalah yang serius apabila korelasi antara dua variabel bebas melebihi 0,8. Jika nilai probabilitasnya lebih kecil dari 0,8 maka tidak ada masalah multikolinieritas, namun jika probabilitasnya lebih besar dari 0,8 maka ada masalah multikolinieritas.

5. Uji Statistik

a. Menghitung Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi menunjukkan tingkat ketepatan garis regresi.

Koefisien determinasi digunakan untuk menggambarkan seberapa besar varians yang terjadi pada variebel terikat dapat dijelaskan oleh variabel bebas.

b. Uji Parsial (Uji t)

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial. Uji t ini akan menggambarkan seberapa signifikan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Menurut (Ali Muhsin 2009: 5) jika nilai sig t < 0,05 maka hipotesis diterima, dan sebaliknya jika nilai sig t > 0,05 maka hipotesis ditolak.

c. Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara bersama-sama/ simultan terhadap variabel terikat. Hubungan yang signifikan berarti hubungan tersebut dapat diberlakukan untuk populasi..

Menurut (Ali Muhsin, 2009: 4) jika nilai sig F < 0,05 maka hipotesis diterima dan sebaliknya jika sig F > 0,05 maka hipotesis ditolak.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Statistik Deskriptif

Data yang digunakan dalam penelitian ini, seluruhnya merupakan data sekunder yang diperoleh dari Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Penelitian ini menggunakan 8 variabel yang terbagi atas 1 variabel terikat, 3 variabel bebas, dan 4 variabel kontrol. Variabel terikat adalah ketimpangan pendapatan (GINI), variabel bebas terdiri dari rasio ekspor per PDRB (REKS), rasio impor per PDRB (RIM), rasio penanaman modal asing per PDRB (RPMA), sementara variabel kontrol terdiri dari rata-rata lama sekolah (RLS), rasio tenaga kerja sektor agrikultur per total tenaga kerja (TKAGR), dan rasio tenaga kerja sektor industri per total tenaga kerja (TKIND).

Berdasarkan data 29 provinsi di Indonesia periode 2007 sampai 2013 dengan jumlah sampel secara keseluruhan sebanyak 203 sampel yang kemudian diolah menggunakan Eviews 6, diperoleh statistik deskriptif dari tiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 7. Statistik Deskriptif

Variabel	Mean	Std. Dev	Maximum	Minimum
GINI (indeks)	35.26453	4.12023	44.2000	25.90000
REKS (ratio)	29.86589	33.37098	277.0747	0.287188
RIM (ratio)	13.08702	27.78172	155.6614	0
RPMA (ratio)	3.185651	5.342117	41.46325	0
APM (persen)	48.89051	8.297648	67.62000	29.16044
RLS (tahun)	8.110099	0.95755	11.00000	5.800000
TKAGR (ratio)	43.06081	16.49729	77.85424	0.417632
TKIND (ratio)	8.958021	6.4813	32.84699	1.112483

Sumber: Output Eviews 6

Pada tabel 7 dapat dilihat terdapat nilai maximum yang menunjukkan nilai tertinggi dari setiap variabel, nilai minimum yang menunjukkan nilai terendah dari setiap variabel, nilai *mean* yang menunjukkan nilai rata-rata dari setiap variabel, serta standar deviasi yang menunjukkan seberapa besar perbedaan nilai sampel terhadap rata-ratanya. Berdasarkan pada lampiran data variabel penelitian, diketahui nilai GINI terendah sebesar 25.9 terjadi di provinsi Bangka Belitung pada tahun 2007, sedangkan nilai tertinggi sebesar 44.2 terjadi di provinsi Papua pada tahun 2013. Selain itu diperoleh juga nilai *mean* sebesar 35.26. Sementara standar deviasinya sebesar 4.12, nilai tersebut menunjukkan perbedaan sebaran yang relatif kecil karena nilainya kurang dari nilai *mean*. Hal ini menunjukkan bahwa data variabel indeks gini dalam penelitian ini baik.

Sementara pada variabel REKS, keterbukaan ekspor terendah sebesar 0.28 terjadi di provinsi Aceh tahun 2010, sedangkan keterbukaan tertinggi sebesar 277.07 terjadi di provinsi Papua Barat tahun 2007. *Mean* variabel ini sebesar 29.86 dan standar deviasinya sebesar 33.37. Nilai standar deviasi variabel ini cukup besar hingga melebihi nilai *mean*-nya, hal ini menunjukkan terdapat data yang jauh dari rata-rata.

Pada variabel RIM, keterbukaan impor terendah sebesar 0.00 terjadi di provinsi Bangka Belitung tahun 2007 dan provinsi Papua Barat tahun 2007, sedangkan keterbukaan tertinggi sebesar 155.66 terjadi di provinsi Kepulauan Riau tahun 2007. Kemudian diperoleh rasio *mean* sebesar 13.08, sementara standar deviasinya diperoleh sebesar 27.78. Nilai standar deviasi variabel ini

cukup besar hingga melebihi nilai *mean*-nya, hal ini menunjukkan terdapat data yang jauh dari rata-rata.

Pada variabel RPMA, keterbukaan PMA terendah sebesar 0 terjadi di beberapa provinsi, yaitu provinsi Aceh tahun 2008, Maluku pada tahun 2007-2009, dan Maluku Utara pada tahun 2007-2008. Sedangkan keterbukaan PMA tertinggi sebesar 41.46 terjadi di provinsi Maluku Utara tahun 2010. Rasio *mean* variabel ini sebesar 3.18 dan standar deviasinya sebesar 5.34. Seperti yang terjadi pada data variabel ketebukaan ekspor dan impor, nilai standar deviasi variabel keterbukaan PMA juga cukup besar dengan melebihi nilai *mean*-nya, yang berarti terdapat data yang jauh dari rata-rata.

Sementara pada variabel APM, APM terendah sebesar 29.16 terjadi di provinsi Papua tahun 2012, sedangkan APM tertinggi sebesar 67.62 terjadi di provinsi Kepulauan Riau tahun 2013. Rasio *mean* variabel ini sebesar 48.89 dan standar deviasinya sebesar 8.29. Nilai tersebut menunjukkan perbedaan sebaran yang relatif kecil karena nilainya kurang dari nilai *mean*. Hal ini menunjukkan bahwa data variabel indeks gini dalam penelitian ini baik.

Pada variabel RLS, RLS terendah sebesar 5.8 tahun terjadi di provinsi Papua tahun 2013, sedangkan RLS sebesar 11 tahun terjadi di provinsi DKI Jakarta tahun 2013. Selain itu diperoleh juga nilai *mean* sebesar 8.11 tahun. Sementara standar deviasinya sebesar 0.95, nilai tersebut menunjukkan perbedaan sebaran yang relatif kecil karena nilainya kurang dari nilai *mean*. Hal ini menunjukkan bahwa data variabel RLS dalam penelitian ini baik.

Pada variabel TKAGR, rasio TKAGR terhadap total tenaga kerja terendah sebesar 0.41 terjadi di provinsi DKI Jakarta tahun 2013, sedangkan rasio tertinggi sebesar 77.85 terjadi di provinsi Papua tahun 2010. Selain itu diperoleh juga nilai *mean* sebesar 43.06. Sementara standar deviasinya sebesar 16.49, nilai tersebut menunjukkan perbedaan sebaran yang relatif kecil karena nilainya kurang dari nilai *mean*. Hal ini menunjukkan bahwa data variabel TKAGR dalam penelitian ini baik.

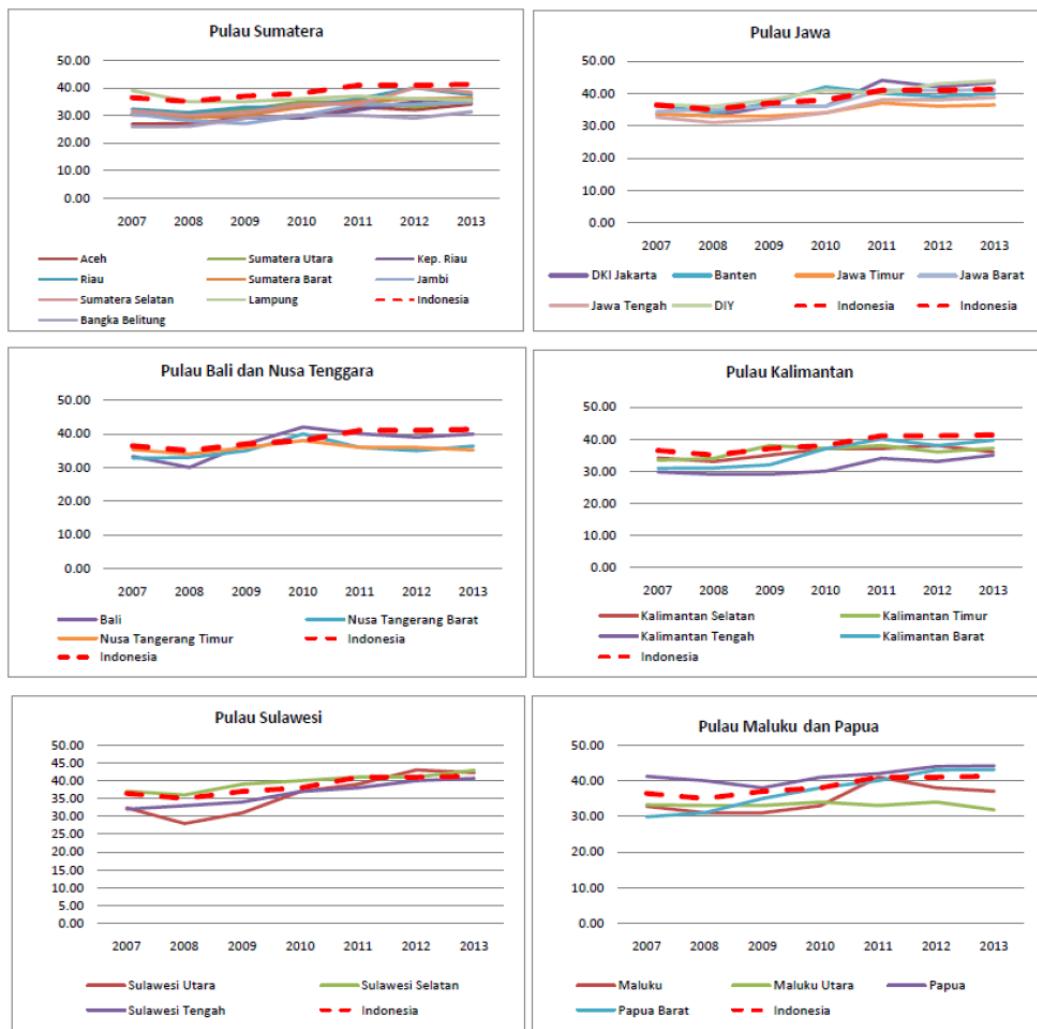
Sementara pada variabel TKIND, rasio TKIND terhadap total tenaga kerja terendah sebesar 1.11 terjadi di provinsi Papua tahun 2012, sedangkan rasio tertinggi sebesar 32.84 terjadi di provinsi Kepulauan Riau tahun 2010. Nilai *mean* variabel ini sebesar 8.95 dan standar deviasinya sebesar 6.48, nilai tersebut lebih kecil dibanding nilai *mean*, sehingga data variabel TKIND dapat dikatakan baik.

B. Gambaran Perkembangan Variabel Penelitian

Sebelum dilakukan uji analisis, peneliti mencoba untuk mengulas atau memberikan gambaran umum dari setiap variabel penelitian.

1. Ketimpangan Pendapatan di Indonesia

Apabila dilihat berdasarkan perspektif pulau seperti grafik 6, terlihat bahwa ketimpangan pendapatan di 29 provinsi di Indonesia dalam kurun waktu tahun 2007-2013 mengalami perkembangan yang fluktuatif namun cenderung meningkat. Penurunan ketimpangan pendapatan terjadi pada tahun 2008 dan 2012 di 13 provinsi di Indonesia. Adapun pulau Jawa, Papua dan Sulawesi cenderung memiliki tingkat ketimpangan pendapatan diatas tingkat ketimpangan pendapatan nasional.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Grafik 6. Indeks Gini menurut Provinsi di Indonesia tahun 2007-2013

2. Ekspor di Indonesia

Apabila dilihat berdasarkan perspektif pulau seperti grafik 7, terlihat bahwa pulau Jawa mendominasi ekspor non migas nasional dengan provinsi Jawa Barat sebagai provinsi penyumbang tertinggi ekspor non migas nasional. Jawa Barat unggul dengan komoditi utamanya berupa alat elektronik, mesin, bahan kimia, dan produk karet/ plastik. Pada tahun 2013 pulau Jawa menyumbang ekspor non migas sebesar 69053 juta US\$ atau 47% dari total ekspor non migas Indonesia. Hal ini dikarenakan industri yang

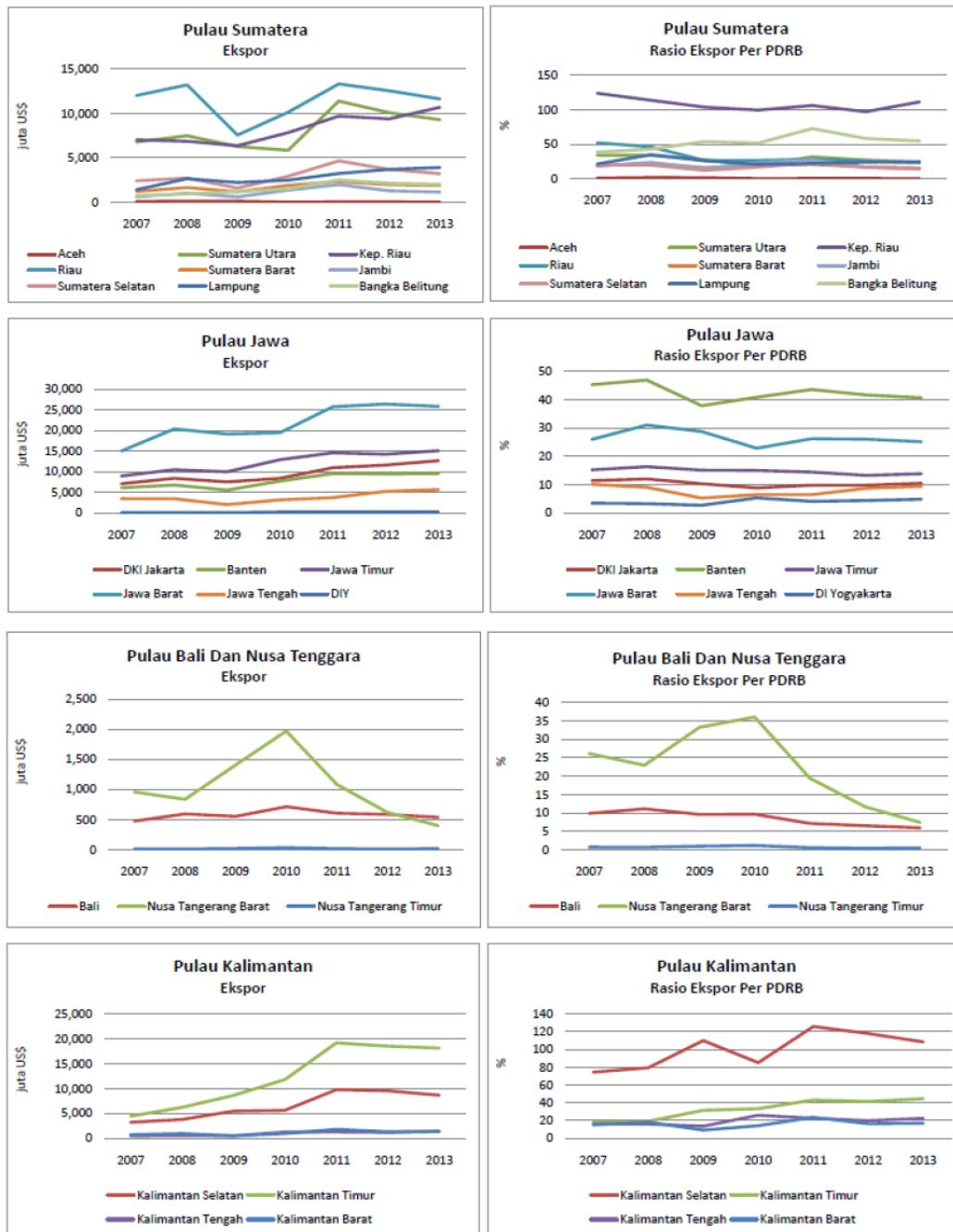
berpotensi ekspor mayoritas berada di pulau Jawa. Ketidakmerataan infrastruktur, seperti jalan, dan listrik serta perbedaan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu penyebab pemilik modal enggan mendirikan industri di luar Jawa.

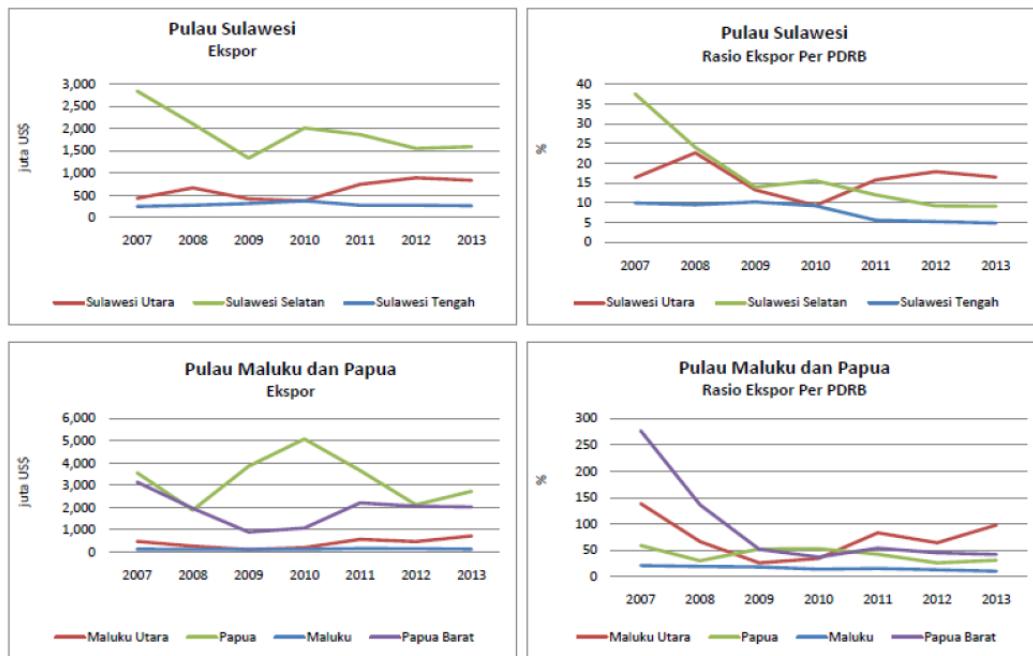
Sedangkan di pulau lainnya penyumbang ekspor yang tergolong tinggi berasal dari provinsi Kalimantan Timur, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, dan Kalimantan Selatan, sementara provinsi lainnya berada jauh dibawah provinsi-provinsi tersebut. Produk ekspor utama provinsi-provinsi tersebut merupakan komoditi yang berasal dari sumber daya alam berupa batu bara dan minyak kelapa sawit mentah (*crude palm oil/ CPO*), hanya provinsi Kepulauan Riau yang memiliki produk ekspor utama berupa produk mesin elektronik, dan produk dari besi dan baja.

Namun hasil terlihat cukup berbeda apabila dilihat dari rasio ekspor per PDRB, provinsi Jawa Barat yang memiliki nilai ekspor non migas tertinggi justru memiliki rasio ekspor dibawah provinsi lainnya. Rasio ekspor tertinggi terjadi di provinsi Kepulauan Riau dengan menyentuh angka 111.44%, Kalimantan Selatan dengan rasio 108.59, sementara Jawa Barat hanya sebesar 25.21%. Hal ini menunjukkan bahwa pada beberapa provinsi penyumbang ekspor non migas yang tinggi justru ekspor tidak menjadi sumber utama PDRB provinsi tersebut.

Selain itu seperti halnya ketimpangan pendapatan, rasio ekspor pada setiap provinsi juga menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Namun

tren perkembangannya cenderung mengalami penurunan, hanya provinsi-provinsi di pulau Kalimantan yang mengalami peningkatan.





Sumber: Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik (diolah)

Grafik 7. Ekspor Non Migas menurut Provinsi di Indonesia tahun 2007-2013

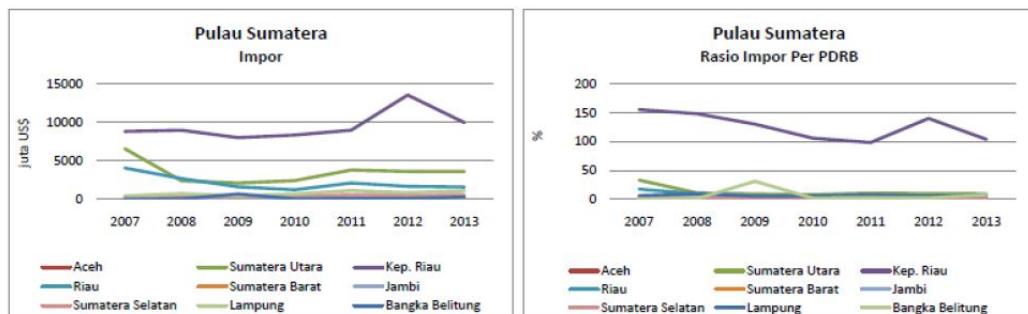
3. Impor di Indonesia

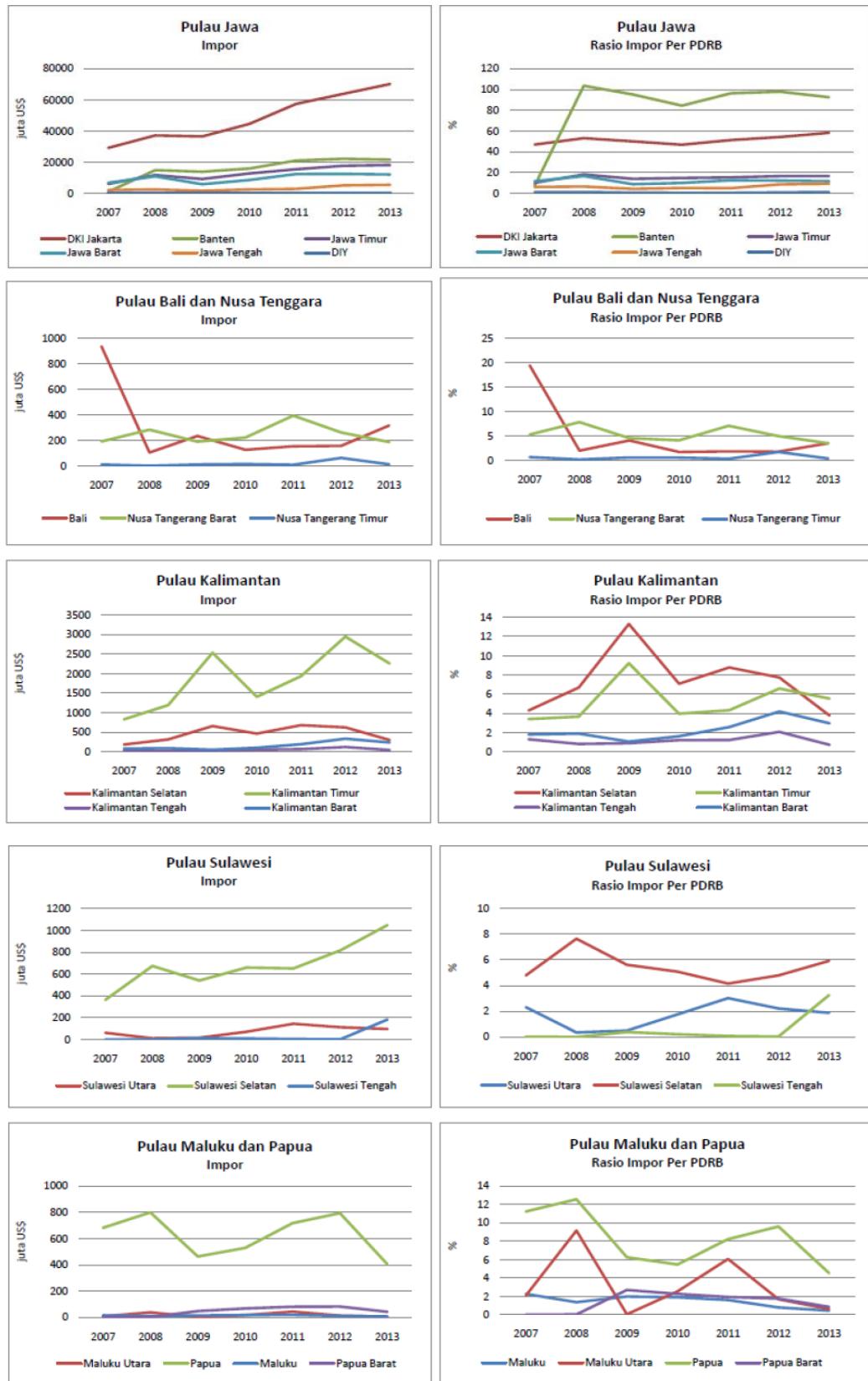
Apabila dilihat berdasarkan perspektif pulau seperti grafik 8, terlihat bahwa pulau Jawa mendominasi impor non migas nasional. Pada tahun 2013 nilai impor non migas pulau Jawa mencapai 127892 juta US\$ atau menyumbang 84.86% dari total impor non migas Indonesia. Provinsi DKI Jakarta memimpin jauh diatas provinsi lainnya dengan nilai impor yang telah menyentuh angka 70197 juta US \$ pada tahun 2013. Banyaknya kebutuhan bahan baku industri menjadi penyebab utama dominasi ini. Padatnya industri yang berlokasi di ibu kota Jakarta terlihat dari ragam produk yang impor, yaitu produk mesin, pesawat mekanik, peralatan listrik serta kendaraan dan komponen-komponen kendaraan yang memang sebagian besar belum dapat diproduksi di dalam negeri.

Diluar pulau Jawa, hanya provinsi Kepulauan Riau yang nilai impornya tergolong tinggi, sementara provinsi lainnya di pulau Sumatera, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi dan Papua menunjukkan nilai impor dibawah 5000 juta US\$. Hal ini dikarenakan bahan baku komoditi ekspor provinsi Kepulauan Riau belum bisa diproduksi didalam negeri, berbeda dengan provinsi lainnya yang bahan bakunya merupakan sumber daya alam yang memang sudah tersedia. Ini terlihat dari komoditas utama impor provinsi Kepulauan Riau yang tidak jauh berbeda dengan komoditas eksportnya.

Namun apabila dilihat berdasarkan rasio impor, akan ditemukan hasil yang berbeda. Provinsi DKI Jakarta yang memiliki nilai impor jauh diatas seluruh provinsi lainnya, justru rasio impor atas PDRB provinsinya belum menyentuh angka 58.41%. Rasio ini berada dibawah rasio provinsi Kepulauan Riau dan Banten yang berkisar angka 103.77% dan 92.55%.

Perkembangan rasio impor menunjukkan tren yang fluktuatif, perkembangan yang cukup stabil ditunjukkan pada provinsi-provinsi di pulau Jawa dan pulau Sumatera. Meskipun demikian pada pulau Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi menunjukkan kecenderungan peningkatan rasio impor.





Sumber: Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik (diolah)

**Grafik 8. Impor Non Migas menurut Provinsi di Indonesia
Tahun 2007-2013**

4. Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia

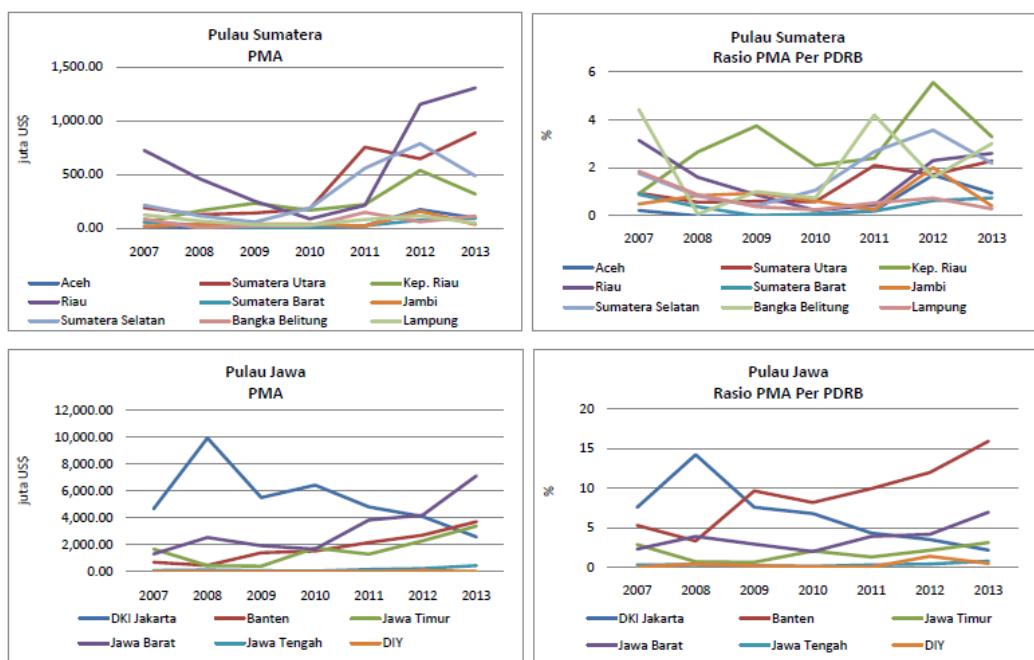
Sementara apabila dilihat dalam perspektif antar provinsi yang tertera pada grafik 9, terlihat bahwa posisi pulau Jawa sebagai pusat perekonomian Indonesia membuat pulau ini tidak hanya menyumbang ekspor dan impor non migas terbesar tapi juga menjadi kawasan favorit bagi investor. Hanya provinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta yang PMA-nya rendah. Sementara provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat menjadi provinsi terfavorit investasi asing, posisi provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota Indonesia membuat investor asing tertarik untuk menempatkan alamat perusahaannya di provinsi ini. Namun sejak tahun 2012 hingga 2013, provinsi Jawa Barat telah mengambilalih posisi pertama nasional dari provinsi DKI Jakarta, selain itu pada tahun 2013 terjadi juga peningkatan PMA pada provinsi Banten dan Jawa Timur hingga membawa kedua provinsi ini ke posisi kedua dan ketiga nasional sementara PMA provinsi DKI Jakarta justru mengalami penurunan hingga hanya menempati posisi keempat nasional. Penurunan ini dikarenakan permasalahan lahan di provinsi DKI Jakarta yang sudah sempit dan kesulitan mencari tenaga kerja yang terampil.

Sedangkan di pulau lainnya, hanya provinsi Riau, Kalimantan Timur, dan Papua yang nilai investasinya tergolong tinggi. Investasi pada ketiga provinsi tersebut tinggi karena pada wilayah tersebut memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat menguntungkan bagi investor asing. Provinsi Riau dengan kekayaan alam berupa keadaan alam yang sesuai untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit, Kalimantan Timur dengan kekayaan

tambangnya berupa minyak bumi, gas bumi, dan batu bara, serta Papua dengan dua gunung emas terbesar di dunia, Ersberg dan Grasberg yang tidak hanya menghasilkan emas namun juga menghasilkan tembaga, perak dan uranium yang memiliki nilai ekonomis tak kalah tinggi dengan emas.

Namun seperti pada data ekspor dan impor, ada perbedaan antara nilai PMA dan rasio PMA. Rasio PMA terhadap PDRB tertinggi terjadi di provinsi Maluku Utara dengan rasio yang telah menyentuh angka 36.32%. Sementara provinsi di pulau Jawa memiliki rasio PMA jauh dibawah provinsi Maluku Utara dan Papua., dimana rasio tertinggi pada provinsi di pulau Jawa tahun 2013 masih dibawah angka 15.89%.

Perkembangan rasio PMA menunjukkan tren yang sangat luktuatif, meskipun demikianhampir seluruh provinsi menunjukkan kecenderungan peningkatan rasio penanaman modal asing. Selain itu pada provinsi-provinsi di pulau Kalimantan, Sulawesi, serta Maluku dan Papua terlihat terjadi peningktan tajam yang serentak pada tahun 2010.





Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Badan Pusat Statistik (diolah)

Grafik 9. Penanaman Modal Asing Menurut Provinsi di Indonesia tahun 2007-2013

5. Angka Partisipasi Murni

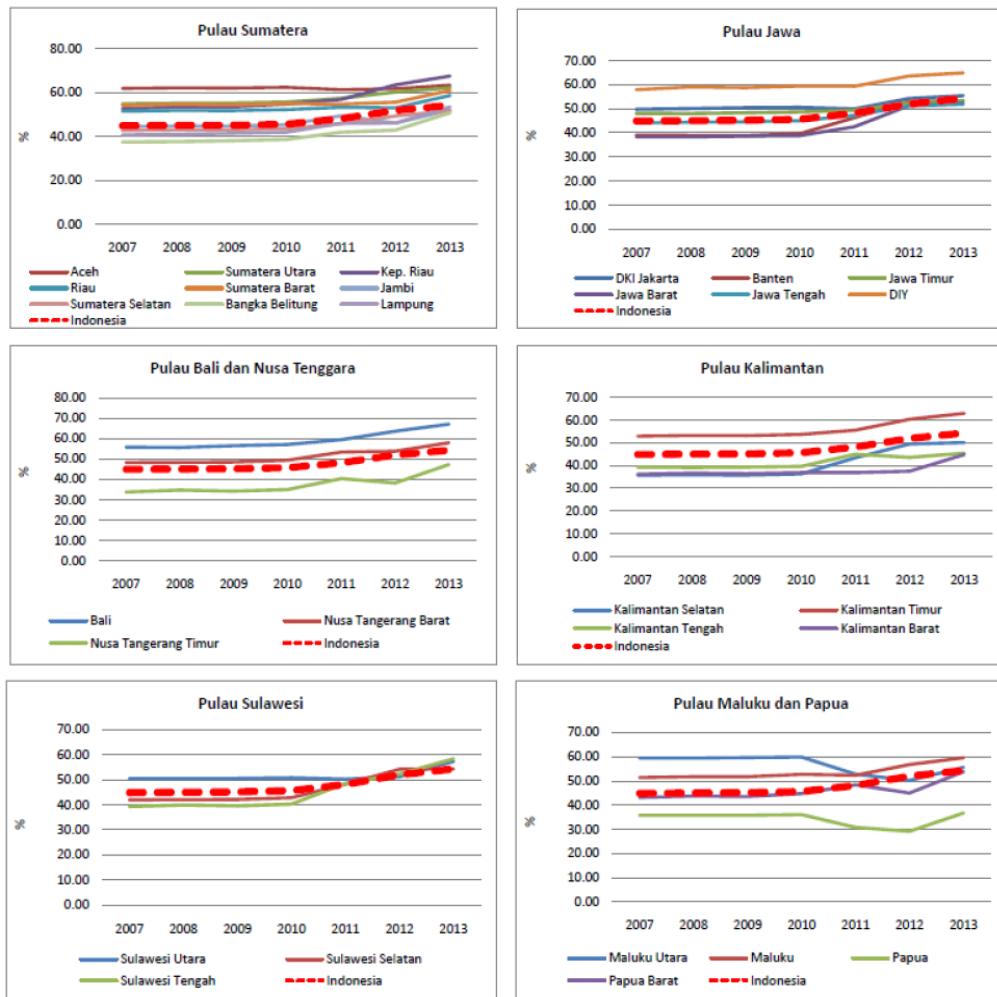
Berdasarkan grafik 10, terlihat bahwa pendidikan jenjang sekolah menengah atas masih menjadi hal yang *exclusive* bagi sebagian penduduk

Indonesia, karena pada tahun 2013 jenjang pendidikan ini memang baru bisa dinikmati oleh 54 persen penduduk Indonesia. Sementara apabila dilihat dari perkembangannya, antara tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 perkembangan angka partisipasi murni pada seluruh provinsi di Indonesia sangat rendah. Perkembangan yang cukup signifikan terlihat mulai terjadi sejak tahun 2011, meskipun beberapa provinsi justru mengalami penurunan dimana salah satu penyebabnya adalah perubahan metode penghitungan indikator angka partisipasi murni.

Provinsi Kepulauan Riau dan provinsi Bali menjadi provinsi dengan tingkat angka partisipasi murni paling tinggi dibanding provinsi lainnya, yaitu menyentuh angka 67 persen pada tahun 2013, kemudian disusul provinsi DI Yogyakarta dan Aceh. DKI Jakarta sendiri sebagai ibu kota negara Indonesia justru berada pada urutan 14 atau berada dibawah 13 provinsi lainnya, yaitu hanya menyentuh angka 55 persen pada tahun 2013. Hal ini menunjukkan bahwa hanya separuh penduduk pusat kota Indonesia yang menikmati bangku sekolah menengah atas.

Sebaliknya provinsi Papua menjadi provinsi dengan angka partisipasi murni yang paling tertinggal dibanding provinsi lainnya, dimana pada tahun 2013 hanya mencapai angka 36 persen. Selain provinsi Papua, tingkat APM provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan Selatan juga tergolong rendah. Masih banyaknya provinsi dengan tingkat partisipasi sekolah yang rendah disebabkan oleh faktor kondisi perekonomian, sehingga banyak anak-anak tidak melanjutkan sekolah karena lebih memilih untuk bekerja demi

membantu perekonomian keluarga; dan masih ada faktor sosial budaya seperti menikah di usia muda (usia pendidikan sekolah menengah dan atas).



Sumber: Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id)

**Grafik 10. Angka Partisipasi Murni Menurut Provinsi di Indonesia
Tahun 2007-2013**

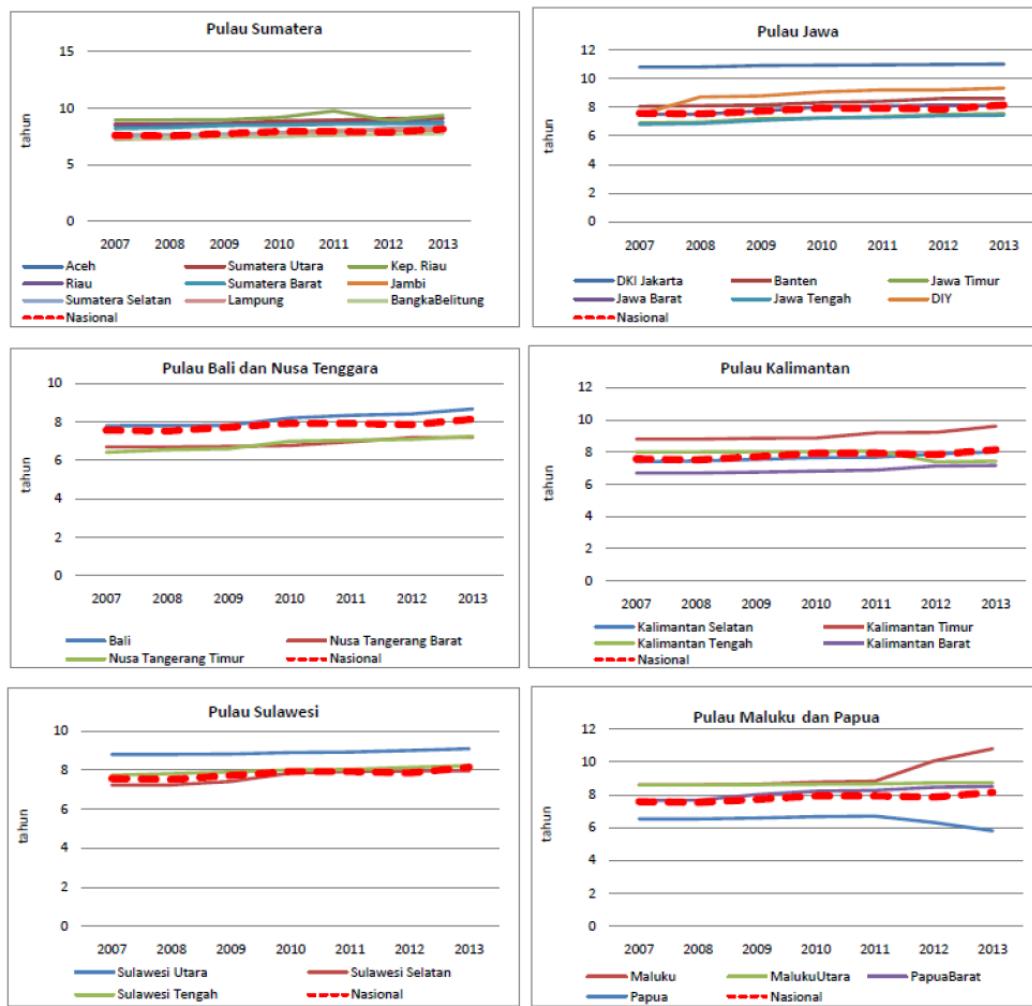
6. Rata-rata Lama Sekolah

Berdasarkan grafik 11 terlihat bahwa rata-rata lama sekolah secara perlahan mengalami kenaikan meskipun sempat terjadi penurunan di lima provinsi pada tahun 2012 dan dua provinsi pada tahun 2013. Provinsi DKI Jakarta memiliki rata-rata lama sekolah jauh diatas provinsi lainnya, dimana

rata-rata lama sekolah provinsi lainnya masih berada pada kisaran 7 hingga 9 tahun pada tahun 2013, namun provinsi DKI Jakarta telah mencapai angka 11 tahun pada tahun 2013. Peningkatan tersebut tidak terlepas dari peranan pemerintah daerah provinsi DKI Jakarta melalui beberapa programnya, seperti *dedicated program*.

Sebaliknya provinsi Papua menjadi provinsi dengan rata-rata lama sekolah yang paling tertinggal dibanding provinsi lainnya, dimana pada tahun 2013 hanya mencapai 5,8 tahun. Pencapaian tersebut turun dari tahun 2012 yang telah mencapai 6,3. Penurunan tersebut disebabkan faktor kondisi perekonomian masyarakat yang rendah sehingga masyarakat Papua tidak mampu mendapatkan pendidikan. Selain provinsi Papua, beberapa provinsi pun masih menunjukkan capaian yang rendah yaitu berkisar 7 tahun. Bahkan provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur yang berada di pulau Jawa juga baru mencapai rata-rata lama sekolah 7,43 dan 7,54 pada tahun 2013.

Masih banyaknya provinsi dengan capaian rata-rata lama sekolah yang rendah disebabkan oleh faktor kondisi perekonomian; banyak penduduk diluar usia sekolah (15 tahun keatas) melakukan pendidikan di luar sekolah, seperti kursus paket A, B, C; masih banyak anak-anak yang tidak melanjutkan sekolah karena lebih memilih untuk bekerja demi membantu perekonomian keluarga; dan masih adanya faktor sosial budaya seperti menikah di usia muda (usia pendidikan sekolah menengah dan atas).
(Bappenas, 2014: 7-8)



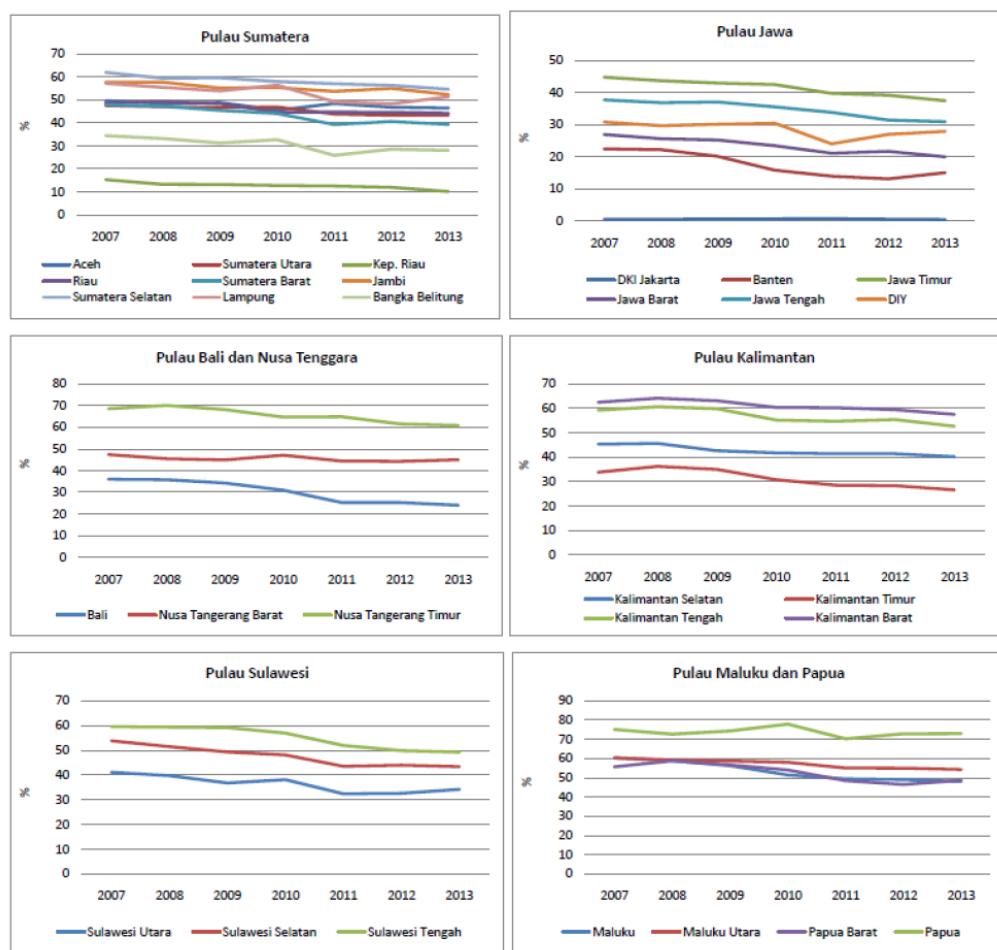
Sumber: Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id)

Grafik 11. Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Provinsi Tahun 2007-2013

7. Tenaga Kerja Sektor Agrikultur di Indonesia

Berdasarkan grafik 12, terlihat bahwa persentase tenaga kerja yang bekerja di sektor agrikultur mengalami penurunan yang cukup tinggi dan terjadi secara merata pada seluruh provinsi di Indonesia. Penurunan jumlah tenaga kerja di sektor agrikultur tidak terlepas dari adanya pandangan bahwa terjadinya pembangunan ekonomi didentifikasi dengan tingginya sektor industri dan jasa, sementara sektor agrikultur tidak begitu penting. Hal ini terlihat dari belum adanya keberpihakan pemerintah di sektor agrikultur

khususnya sektor pertanian, dimana sampai sekarang infrastruktur masih stagnan, sementara jumlah lahan garapan semakin menyempit untuk penggunaan lainnya, biaya operasional pun meningkat serta adanya impor komoditas pertanian seperti tembakau juga membuat harga komoditas pertanian dalam negeri semakin rendah. Kondisi ini membuat petani memilih untuk beralih ke sektor lain yang lebih menjamin kesejahteraan mereka.



Sumber: Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id)

Grafik 12. Persentase Tenaga Kerja di Sektor Agrikultur Menurut Provinsi Tahun 2007-2013

8. Tenaga Kerja Sektor Industri di Indonesia

Berdasarkan grafik 13, terlihat bahwa persentase tenaga kerja yang bekerja di sektor industri pada setiap pulau menunjukkan tren yang berbeda

berbeda. Meskipun demikian secara nasional tenaga kerja di sektor industri mengalami kenaikan namun sangat kecil.

Provinsi-provinsi di pulau Jawa memiliki tingkat pertumbuhan tenaga kerja di sektor industri paling tinggi dibanding provinsi di pulau lainnya. Hal ini dikarenakan pulau Jawa paling terkondisikan untuk didirikan industri, mulai dari aspek infrastruktur, rendahnya harga pasar, hingga tenaga kerja yang terampil menjadi pertimbangan yang sangat penting bagi wirausahawan. Sementara pertumbuhan tenaga kerja di sektor industri pada provinsi di pulau lain bersifat fluktuatif bahkan beberapa cenderung mengalami penurunan.



Sumber: Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id)

Grafik 13. Persentase Tenaga Kerja di Sektor Industri Menurut Provinsi Tahun 2007-2013

C. Penentuan Metode Estimasi Data Panel

Penelitian ini menggunakan estimasi data panel, oleh karena itu metode estimasi data panel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode *common effect, fixed effect* atau *random effect*. Untuk menentukan metode terbaik yang akan digunakan dalam mengestimasi model data panel dalam penelitian ini maka akan dilakukan uji *Chow* dan uji *Hausman*. Berikut adalah hasil uji penentuan metode estimasi data panel:

1. Uji *Chow*

Uji *Chow* digunakan untuk melihat apakah model estimasi mengikuti metode *common effect* atau *fixed effect*. Untuk mengetahui hal tersebut maka dilakukan uji *Chow* dengan probabilitas 0.05. Adapun hipotesis yang digunakan dalam uji *Chow* adalah sebagai berikut:

H_0 : *Common Effect*

H_a : *Fixed Effect*

Dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

Jika $\text{prob. } F < 0.05$, maka H_0 ditolak (*fixed effect*)

Jika $\text{prob. } F > 0.05$, maka H_0 diterima (*common effect*)

Berikut hasil uji *Chow*:

Tabel 8. Hasil Uji Chow

Probabilitas F	Indikator Uji	Hasil	Keretangan
0.0000	Prob. $F < \text{sig}$ ($0.0000 < 0.05$)	H_0 ditolak	Metode terpilih <i>fixed effect</i>

Sumber: Hasil olahan eviews 6 (terlampir)

Berdasarkan tabel 8, diketahui bahwa probabilitas F sebesar 0.0000 lebih kecil dari signifikansi sebesar 0.05 ($0.0000 < 0.05$), yang artinya H_0

berhasil ditolak sehingga metode yang terpilih adalah *fixed effect*. Setelah mengetahui bahwa metode *fixed effect* lebih baik daripada metode *common effect*, selanjutnya perlu dilakukan uji *Hausman*.

2. Uji *Hausman*

Uji *Hausman* digunakan untuk melihat apakah model estimasi mengikuti metode *random effect* atau *fixed effect*. Untuk mengetahui hal tersebut maka dilakukan uji *Hausman* dengan probabilitas 0.05. Adapun hipotesis yang digunakan dalam uji *Hausman* adalah sebagai berikut:

H_0 : *Random Effect*

H_a : *Fixed Effect*

Dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

Jika $\text{prob. } F < 0.05$, maka H_0 ditolak

Jika $\text{prob. } F > 0.05$, maka H_0 diterima

Berikut hasil uji *Hausman*:

Tabel 9. Hasil Uji Hausman

Probabilitas F	Indikator Uji	Hasil	Keretangan
0.0000	Prob. $F < \text{sig}$ ($0.0000 < 0.05$)	H_0 ditolak	Metode terpilih <i>fixed effect</i>

Sumber: Hasil olahan eviews 6 (terlampir)

Pada tabel 9, diketahui bahwa probabilitas F sebesar 0.0000 lebih kecil dari signifikansi sebesar 0.05 ($0.0000 < 0.05$), yang artinya H_0 berhasil ditolak sehingga metode yang terpilih adalah *fixed effect*. Berdasarkan hasil uji *Chow* dan uji *Hausman*, maka metode yang paling tepat digunakan dalam model penelitian ini adalah metode *fixed effect*.

D. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk melihat apakah data berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini uji normalitas yang digunakan adalah Uji *Jarque-Bera (JB)*. Adapun hipotesis yang digunakan dalam uji Normalitas adalah sebagai berikut:

H_0 : Residual terdistribusi secara normal

H_a : Residual tidak terdistribusi secara normal

Dengan kriteria pengambilan keputusan dalam uji *Jarque-Bera* sebagai berikut:

Jika JB Statistik $>$ *Chi Square* tabel, maka H_0 ditolak

Jika JB Statistik $<$ *Chi Square* tabel, maka H_0 diterima

Berikut hasil uji normalitas:

Tabel 10. Hasil Uji Normalitas

Jarque-Bera	Chi Square	Hasil	Keterangan
4.484338	12.59159	$JB < \text{Chi Square}$ (H_0 diterima)	Data berdistribusi normal

Sumber: hasil normality test Eviews 6 diolah

Dari tabel di atas diketahui nilai *Jarque-Bera (JB)* sebesar 4.484338 sementara nilai *Chi Square* dengan melihat jumlah variabel bebas yang dipakai adalah 7 variabel bebas dan nilai signifikansi yang dipakai dalam penelitian ini adalah 0,05 atau 5%, maka didapat nilai *Chi Square table* sebesar 14.06714, yang berarti nilai *JB* lebih kecil dari nilai *Chi Square table* ($4.484338 < 14.06714$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa **asumsi berdistribusi normal dalam model terpenuhi.**

2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk melihat besaran korelasi antara variabel bebas. Adapun yang menjadi acuan dalam pengambilan keputusan uji multikolinieritas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Korelasi < 0.8 , maka tidak terdapat masalah multikolinieritas

Korelas > 0.8 , maka terdapat masalah multikolinieritas

Berikut hasil uji multikolinieritas:

Tabel 11. Hasil Uji Multikolinieritas

	REKS	RIM	RPMA	APM	RLS	TKAGR	TKIND
REKS	1.0000	0.3545	0.0958	-0.0966	0.0115	-0.0827	0.0950
RIM	0.3543	1.0000	0.1416	0.1124	0.3202	-0.5955	0.7298
RPMA	0.0958	0.1416	1.0000	0.0108	0.0574	-0.0491	0.0073
APM	-0.0966	0.1124	0.0108	1.0000	0.6325	-0.3951	0.1956
RLS	0.0115	0.3202	0.0574	0.6325	1.0000	-0.6036	0.2399
TKAGR	-0.0827	-0.5955	-0.0491	-0.3951	-0.6036	1.0000	-0.7804
TKIND	0.0950	0.7298	0.0073	0.1956	0.2399	-0.7804	1.0000

Sumber: hasil correlations Eviews 6 diolah

Dari tabel diatas diketahui bahwa terjadi nilai korelasi yang cukup tinggi pada beberapa variabel bebas, yaitu antara varibel TKAGRI dan variabel TKIND sebesar -0.7804, dan antara variabel TKIND dan impor sebesar 0.7298. Namun karena nilai korelasi itu masih berada dibawa 0.8 walaupun sudah sangat mendekati, maka variabel bebas dalam penelitian ini tetap dinyatakan tidak mengalami multikolinieritas atau **asumsi tidak terjadi multikolinieritas dalam model terpenuhi.**

E. Estimasi Model Regresi

Estimasi model regresi menggunakan data panel digunakan untuk mengetahui pengaruh keterbukaan ekonomi (REKS, RIM, dan RPMA) serta

variabel kontrol APM, RLS, TKAGR, dan TKIND) terhadap Ketimpangan Pendapatan (GINI). Berikut ini adalah tabel hasil estimasi model regresi data panel dengan metode *fixed effect*:

Tabel 12. Hasil Estimasi

Variabel Terikat = GINI	Koefisien	Prob.
Variabel Bebas	Koefisien	Prob.
Constanta	48.73805	
REKS	-0.025294	0.0065***
RIM	0.003149	0.8838
RPMA	-0.014118	0.7464
APM	0.075153	0.1615
RLS	0.950680	0.2175
TKAGRI	-0.535163	0.0000***
TKIND	-0.108473	0.5030
Prob. F	0.000000	
R-squared	0.739788	
Adj. R-squares	0.685252	
Obs	203	

Sumber: Output Eviews 6 diolah

Keterangan:

*** signifikansi pada 1%, ** signifikansi 5%, * signifikansi pada 10%

Berdasarkan tabel 12, diperoleh hasil estimasi untuk model ketimpangan pendapatan (GINI) sebagai berikut:

$$\text{GINI}_i = 48.73805 - \mathbf{0.025294} \text{ REKS} + 0.003149 \text{ RIM} - \\ 0.014118 \text{ RPMA} + 0.075153 \text{ APM} - \mathbf{0.535163} \text{ TKAGRI} - \\ 0.108473 \text{ TKIND} + \varepsilon$$

F. Uji Signifikansi

a. Koefisien Determinasi (R^2)

Dalam tabel 12 tentang model data panel dengan *fixed effect*, dapat dilihat nilai koefisien determinasinya (R^2) sebesar 0.739788 yang berarti bahwa kemampuan model regresi yang terdiri atas REKS, RIM, RPMA

sebagai variabel bebas dan APM, RLS, TKAGR, TKIND sebagai variabel kontrol mampu menjelaskan variasi GINI sebagai variabel terikat sebesar 73.97%. Sisanya sebesar 26.03% perubahan GINI dijelaskan oleh variabel diluar model.

b. Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk melihat signifikansi pengaruh dari variabel bebas secara parsial terhadap variabel bebas dan untuk melihat apakah hipotesis penelitian (H_a) dapat diterima atau tidak. Pengaruh suatu variabel bebas terhadap variabel terikat dikatakan signifikan dan hipotesis penelitian (H_a) dikatakan diterima apabila probabilitas variabel < 0.01 untuk taraf signifikansi 1%, atau < 0.05 untuk taraf signifikansi 5% serta < 0.10 untuk taraf signifikansi 10%.

Dari tabel 12 telah diketahui probabilitas dari tiap variabel bebas, dengan data tersebut dapat dilakukan pengujian hipotesis penelitian sebagai berikut:

1) Hipotesis 1

Hipotesis pertama digunakan untuk menguji kebenaran bahwa Keterbukaan Ekspor berpengaruh secara signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan di tingkat provinsi di Indonesia pada tahun 2007-2013.

H_0 : Keterbukaan Ekspor (REKS) tidak berpengaruh terhadap Ketimpangan Pendapatan (GINI) di tingkat provinsi di Indonesia pada tahun 2007-2013

Ha: Keterbukaan Ekspor (REKS) berpengaruh terhadap Ketimpangan Pendapatan (GINI) di tingkat provinsi di Indonesia pada tahun 2007-2013

Berdasarkan tabel 12, diketahui bahwa probabilitas variabel keterbukaan ekspor sebesar 0.0065 yang berarti probabilitas lebih kecil dari taraf signifikansi 0.05 ($0.0065 < 0.05$), dengan demikian H_0 berhasil ditolak atau H_a diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada taraf signifikansi 1%, keterbukaan ekspor berpengaruh secara signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di tingkat provinsi di Indonesia pada tahun 2007-2013.

2) Hipotesis 2

Hipotesis kedua digunakan untuk menguji kebenaran bahwa Keterbukaan Impor berpengaruh secara signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan di tingkat provinsi di Indonesia pada tahun 2007-2013.

H_0 : Keterbukaan Impor (RIM) tidak berpengaruh terhadap Ketimpangan Pendapatan (GINI) di tingkat provinsi di Indonesia pada tahun 2007-2013

H_a : Keterbukaan Impor (RIM) berpengaruh terhadap Ketimpangan Pendapatan (GINI) di tingkat provinsi di Indonesia pada tahun 2007-2013

Berdasarkan tabel 12, diketahui bahwa probabilitas variabel keterbukaan impor sebesar 0.8838 yang berarti probabilitas lebih

besar dari taraf signifikansi 0.05 ($0.8838 > 0.10$), dengan demikian H_0 tidak berhasil ditolak atau H_0 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keterbukaan impor tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di tingkat provinsi di Indonesia pada tahun 2007-2013.

3) Hipotesis 3

Hipotesis ketiga digunakan untuk menguji kebenaran bahwa Keterbukaan Penanaman Modal Asing berpengaruh secara signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan di tingkat provinsi di Indonesia pada tahun 2007-2013.

H_0 : Keterbukaan Penanaman Modal Asing (RPMA) tidak berpengaruh terhadap Ketimpangan Pendapatan (GINI) di tingkat provinsi di Indonesia pada tahun 2007-2013

H_a : Keterbukaan Penanaman Modal Asing (RPMA) berpengaruh terhadap Ketimpangan Pendapatan (GINI) di tingkat provinsi di Indonesia pada tahun 2007-2013

Berdasarkan tabel 12, diketahui bahwa probabilitas variabel Keterbukaan PMA sebesar 0.7464 yang berarti probabilitas lebih besar dari taraf signifikansi 0.05 ($0.7464 > 0.10$), dengan demikian H_0 tidak berhasil ditolak atau H_0 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keterbukaan PMA tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan di Tingkat Provinsi di Indonesia pada tahun 2007-2013.

c. Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui secara umum apakah model dapat digunakan atau tidak. Uji F juga digunakan untuk mengetahui kebenaran hipotesis kedelapan yang digunakan untuk menguji kebenaran bahwa REKS, RIM, PMA, APM, RLS, TKAGR, dan TKIND secara bersama-sama (simultan) berpengaruh secara signifikan terhadap Ketimpangan Pendapatan (GINI) pada 29 provinsi di Indonesia pada tahun 2007-2013.

Ho: REKS, RIM, RPMA, APM, RLS, TKAGR, dan TKIND secara bersama-sama (simultan) tidak berpengaruh terhadap Ketimpangan Pendapatan (GINI) di tingkat provinsi di Indonesia pada tahun 2007-2013

Ha: REKS, RIM, RPMA, APM, APM, TKAGR, dan TKIND secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap Ketimpangan Pendapatan (GINI) di tingkat provinsi di Indonesia pada tahun 2007-2013

Berdasarkan tabel 12, diketahui bahwa probabilitas F model sebesar 0.0000 yang berarti probabilitas lebih kecil dari taraf signifikansi 0.01 (0.0000 < 0.01), dengan demikian Ho berhasil ditolak atau Ha diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa REKS, RIM, RPMA, APM, RLS, TKAGR, dan TKIND secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap Ketimpangan Pendapatan (GINI) di tingkat provinsi di Indonesia pada tahun 2007-2013.

G. Pembahasan Hasil Estimasi dan Interpretasinya

Dalam tabel 12 yang telah disajikan, dari tiga indikator keterbukaan ekonomi hanya ekspor yang memiliki pengaruh signifikan terhadap ketimpangan

pendapatan. Adapun dari tiga variabel kontrol yang ada dalam model, hanya tenaga kerja sektor agrikultur yang berpengaruh secara signifikan. Lebih lanjut dapat disimpulkan, bahwa ketimpangan pendapatan pada 29 provinsi di Indonesia yang direpresentasikan dengan indeks gini dalam kurun waktu 2007-2013 tidak secara tegas dipengaruhi oleh impor, penanaman modal asing dan angka partisipasi murni, rata-rata lama sekolah, dan tenaga kerja sektor industri. Berikut akan disajikan pembahasan dan interpretasi dari hasil estimasi tabel 12.:

1. Pengaruh Keterbukaan Ekspor terhadap Ketimpangan Pendapatan di Tingkat Provinsi di Indonesia

Dalam tabel 12 terlihat bahwa variabel keterbukaan ekspor memiliki koefisien negatif dan signifikan pada taraf signifikansi 1% terhadap ketimpangan pendapatan. Koefisien keterbukaan ekspor bernilai -0.025294 menunjukkan bahwa setiap kenaikan keterbukaan ekspor sebesar 1% menyebabkan menurunnya ketimpangan pendapatan sebesar 0.025294%. Hasil ini mendukung hipotesis yang dibangun dan sesuai dengan temuan dari Muradi (2014) yang menyatakan bahwa ekspor mengurangi ketimpangan (gini rasio) di Koridor Ekonomi Pulau Sulawesi-Indonesia.

Ekspor non migas di Indonesia didominasi oleh sektor industri. Pada tahun 2013, 75.39% ekspor Indonesia disumbang dari sektor industri, 20.07% dari sektor pertambangan, dan hanya 3.81% yang berasal dari sektor pertanian (Kementerian Perdagangan). Adapun 10 kelompok industri dengan nilai ekspor terbesar diperoleh dari industri pengolahan kelapa/ kelapa sawit, industri besi baja, mesin-mesin dan otomotif, industri tekstil, industri elektronika, industri pengolahan karet, industri kimia dasar, industri

makanan-dan minuman, industri pulp dan kertas, industri pengolahan kayu dan industri pengolahan tembaga, timah,dan lain-lain. Sebagian besar industri tersebut merupakan industri padat karya, yang artinya semakin tinggi nilai ekspor yang mampu dihasilkan oleh industri-industri tersebut, maka secara langsung akan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja yang dipergunakan dalam industri tersebut.

Konsep ini seperti teori perdagangan internasional oleh kaum neoklasik. Faktor produksi yang melimpah di Indonesia adalah tenaga kerja sementara faktor produksi yang langka adalah modal. Oleh karena itu Indonesia akan lebih cenderung untuk melakukan ekspor barang yang padat karya. Dengan demikian, adanya peningkatan ekspor akan mendorong peningkatan upah sebagai faktor produksi yang utama dalam industri tersebut.

2. Pengaruh Keterbukaan Impor terhadap Ketimpangan Pendapatan di Tingkat Provinsi di Indonesia

Dalam tabel 12 terlihat bahwa probabilitas variabel keterbukaan impor sebesar 0.8838, lebih besar daripada batas eror 10%, sehingga variabel ini dinyatakan tidak signifikan berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Hasil ini bertentangan dengan hipotesis yang dibangun, dimana keterbukaan impor akan berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Namun hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jaumotte, et al (2013) yang menyatakan bahwa impor tidak signifikan berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan (indeks gini).

Banyaknya kasus impor ilegal membuat nilai impor yang tercatat di pemerintah tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Hal ini bisa menjadi salah satu faktor yang menyebabkan keterbukaan impor tidak memiliki pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan di provinsi-provinsi di Indonesia. Pada tahun 2013 saja telah terungkap kasus impor daging sapi ilegal, beras ilegal, garam ilegal, produk telekomunikasi ilegal, dan tentunya masih ada produk-produk impor ilegal lainnya yang belum terkuak.

3. Pengaruh Keterbukaan Penanaman Modal Asing terhadap Ketimpangan Pendapatan di Tingkat Provinsi di Indonesia

Dalam tabel 12 terlihat bahwa probabilitas variabel keterbukaan penanaman modal asing sebesar 0.7464, lebih besar daripada batas eror 10%, sehingga variabel ini dinyatakan tidak signifikan berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Hasil ini bertentangan dengan hipotesis yang dibangun, dimana keterbukaan penanaman modal asing akan berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Namun hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ramly (2012), yang menyatakan bahwa keterbukaan penanaman modal asing tidak signifikan berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan (indeks gini).

Persebaran investasi yang masih belum merata memungkinkan *spread effect* atau *trickle down effect* yang diharapkan tidak terjadi. Seperti yang telah dituliskan pada gambaran umum terlihat bahwa secara nilai penanaman modal asing terpusat pada pulau Jawa.

4. Pengaruh Angka Partisipasi Murni terhadap Ketimpangan Pendapatan di Tingkat Provinsi di Indonesia

Dalam tabel 12 terlihat bahwa probabilitas variabel angka partisipasi murni sebesar 0.1615, lebih besar daripada batas eror 10%, sehingga variabel ini dinyatakan tidak signifikan berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Hasil ini bertentangan dengan hipotesis yang dibangun, dimana angka partisipasi murni akan berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan.

Angka partisipasi murni tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ketimpangan pendapatan dikarenakan adanya perbedaan metodologi penghitungan estimasi, dimana pada tahun 2010 penghitungan inflate tidak didasarkan pada kelompok umur 5 tahunan (0-4, 5-9, 10-14,..dst), sedangkan pada tahun 2011 penghitungan inflatennya berdasarkan kelompok 5 tahunan. Kemudian terdapat pula perbedaan dimana pengumpulan data pada tahun 2010 dilakukan satu kali dalam setahun yaitu pada bulan Juli, sedangkan pada tahun 2011 dilakukan secara triwulanan. Selain itu data tahun 2011-2013 diestimasi dengan menggunakan inflate hasil *back-casting* berdasarkan proyeksi penduduk Indonesia 2010-2035. Sehingga penurunan angka partisipasi murni tidak semuanya terjadi karena secara nyata terjadi penurunan partisipasi namun juga terpengaruhi oleh perbedaan cara penghitungannya. Dengan demikian dapat dikatakan data kurang akurat untuk menjelaskan perkembangan angka partisipasi murni yang sesungguhnya.

5. Pengaruh Rata-rata Lama Sekolah terhadap Ketimpangan Pendapatan di Tingkat Provinsi di Indonesia

Dalam tabel 12 terlihat bahwa probabilitas variabel rata-rata lama sekolah sebesar 0.2175, lebih besar daripada batas eror 10%, sehingga variabel ini dinyatakan tidak signifikan berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Hasil ini bertentangan dengan hipotesis yang dibangun, dimana rata-rata lama sekolah akan berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan.

Rata-rata lama sekolah tidak mampu menjelaskan ketimpangan pendapatan karena variabel ini tidak mampu menjelaskan keadaan masyarakat secara keseluruhan namun hanya secara umum. Apabila di suatu provinsi terdapat ketimpangan pendidikan yang tinggi, maka anak yang tidak sama sekali mengenyam pendidikan bisa tertutupi oleh anak yang mengenyam pendidikan hingga pendidikan yang tertinggi.

6. Pengaruh Tenaga Kerja Sektor Agrikultur terhadap Ketimpangan Pendapatan di Tingkat Provinsi di Indonesia

Dalam tabel 12 terlihat bahwa variabel tenaga kerja sektor agrikultur memiliki koefisien negatif dan signifikan pada taraf signifikansi 1% terhadap ketimpangan pendapatan. Koefisien tenaga kerja sektor agrikultur bernilai negatif 0.535163 menunjukkan bahwa setiap terjadi penurunan tenaga kerja sektor agrikultur sebesar 1% menyebabkan meningkatnya ketimpangan pendapatan sebesar 0.535163%. Hasil ini mendukung hipotesis yang dibangun bahwa tenaga kerja sektor agrikultur berpengaruh secara signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Seperti yang dinyatakan oleh Kuznet, meningkatnya tingkat ketimpangan pendapatan seiring menurunnya jumlah tenaga kerja di sektor agrikultur dikarenakan keadaan ketimpangan pendapatan pada sektor ini memang lebih rendah dibanding setor lainnya. Sehingga apabila tenaga kerja yang semula berkerja pada sektor agrikultur kemudian berpindah ke sektor lain yang memiliki kemungkinan ketimpangan pendapatan yang lebih tinggi, maka ketimpangan pendapatan secara umum akan meningkat. Keadaan ini diperparah dengan rendahnya tingkat pendidikan mayoritas petani Indonesia, sehingga mereka sulit beralih pada profesi yang lebih baik. Mayoritas dari mereka beralih ke sektor informal, baik sebagai buruh tani, buruh bangunan, atau pekerjaan sektor informal yang lainnya.

Selain itu, petani yang beralih profesi ke sektor industri juga memungkinkan terjadinya peningkatan ketimpangan pendapatan dimana petani yang pada awalnya menerima seluruh keuntungan hasil usahanya untuk pribadi berubah menjadi buruh yang mendapat gaji dari perusahaan-perusahaan besar yang dimiliki oleh para pemilik modal. Padahal pada sektor padat modal sudah pasti sebagian besar keuntungan akan mengalir ke pemilik modal, kemudian sebagian kecilnya baru dibagikan pada karyawan dan buruh yang bekerja didalamnya.

7. Pengaruh Tenaga Kerja Sektor Industri terhadap Ketimpangan Pendapatan di Tingkat Provinsi di Indonesia

Dalam tabel 12 terlihat bahwa probabilitas variabel ini sebesar -0.108473, lebih besar daripada batas eror 10%, sehingga variabel ini dinyatakan tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Hasil ini bertentangan dengan hipotesis yang dibangun, dimana tenaga kerja sektor industri akan berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan.

Tenaga kerja sektor industri tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ketimpangan pendapatan karena peningkatannya tidak terlalu besar. Hal ini dikarenakan keberalihan tenaga kerja dari sektor agrikultur terserap diberbagai sektor ekonomi, dan peningkatan tenaga kerja paling tinggi terjadi pada sektor jasa kemasyarakatan. Selain itu peningkatan tenaga kerja sektor industri juga masih cenderung fluktuatif, peningkatan yang konsisten hanya terjadi pada pulau Jawa.

8. Pengaruh Keterbukaan Ekspor, Keterbukaan Impor, Keterbukaan Penanaman Modal Asing, Angka Partisipasi Murni, Rata-rata Lama Sekolah, Tenaga Kerja Sektor Agrikultur, dan Tenaga Kerja Sektor Industri terhadap Ketimpangan Pendapatan di Tingkat Provinsi di Indonesia secara Simultan

Dalam tabel 12 menunjukkan bahwa secara simultan variabel keterbukaan ekspor, keterbukaan impor, keterbukaan penanaman modal asing, angka partisipasi murni, rata-rata lama sekolah, tenaga kerja sektor agrikultur dan tenaga kerja sektor industri berpengaruh secara signifikan pada taraf signifikansi 1% terhadap ketimpangan pendapatan yang terlihat dari probabilitas (F-statistik) sebesar 0.0000. Konstanta dalam model ini bernilai 48.738. yang artinya apabila seluruh variabel bebas bernilai 0 maka ketimpangan pendapatan atau indeks gini akan sebesar 48.738.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisi dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh negatif yang signifikan variabel keterbukaan ekspor terhadap ketimpangan pendapatan di tingkat provinsi di Indonesia dengan taraf signifikansi sebesar 1%. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kenaikan keterbukaan ekspor akan menurunkan ketimpangan pendapatan.
2. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan atas keterbukaan impor terhadap ketimpangan pendapatan di tingkat provinsi di Indonesia.
3. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan atas keterbukaan penanaman modal asing terhadap ketimpangan pendapatan.
4. Variabel kontrol tenaga kerja sektor agrikultur memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan dengan taraf signifikansi sebesar 1%. Variabel kontrol tersebut memiliki pengaruh yang negatif terhadap ketimpangan pendapatan. Sementara variabel kontrol angka partisipasi murni, rata-rata lama sekolah, dan tenaga kerja sektor industri tidak berpengaruh secara signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.
5. Terdapat pengaruh yang signifikan atas keterbukaan ekspor, keterbukaan impor, keterbukaan penanaman modal asing, angka partisipasi murni, rata-rata lama sekolah, tenaga kerja sektor agrikultur, dan tenaga kerja sektor

industri secara bersama-sama (simultan) terhadap ketimpangan pendapatan. Nilai koefisien determinasi sebesar 0.7397 menunjukkan bahwa variabel bebas dan variabel kontrol secara bersama-sama dapat menjelaskan variabel terikat sebesar 73.97% dan sisanya 26.03% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

B. Saran

Keberhasilan suatu bangsa ditentukan oleh tiga pilar, yaitu individu, masyarakat dan Negara. Ketiganya saling terkait dan memiliki peran masing-masing yang tidak bisa diabaikan. Begitu juga terhadap permasalahan perekonomian suatu bangsa, ketiganya harus menjalankan perannya masing-masing dengan baik. Berikut saran peneliti:

1. Bagi Pemerintah

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa keterbukaan ekspor mampu mengurangi ketimpangan pendapatan di tingkat provinsi di Indonesia. Untuk itu Negara atau pemerintah perlu menggunakan kewenangannya dalam membuat kebijakan yang mampu memaksimalkan peluang ini.

- a. Pemerintah harus memaksimalkan kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang mampu mendorong usaha kecil dan menengah (UKM) untuk bisa bersaing dalam ekspor serta menciptakan kesempatan usaha bagi pengusaha baru melalui bantuan pendanaans.seperti.

- b. Pemerintah harus membuat kebijakan pemerataan kesempatan pendidikan bagi seluruh masyarakat Indonesia, seperti jenjang pendidikan sekolah dasar digratiskan sepenuhnya bagi penduduk miskin, dan apabila program tersebut tuntas kemudian berlanjut pada jenjang pendidikan sekolah menengah pertama dan seterusnya.
- c. Pemerintah harus meningkatkan kesejahteraan petani melalui perbaikan infrastruktur pertanian, subsidi pupuk, dan tidak mengimpor komoditi yang telah terpenuhi dengan produksi dalam negeri, seperti garam, tembakau dan lain-lain. Dan dalam jangka panjang pemerintah harus mendorong petani untuk bisa melakukan ekspor.

2. Bagi Masyarakat dan Individu

Seluruh masyarakat Indonesia harus sadar akan pentingnya pendidikan. Untuk menghadapi era globalisasi sekarang ini, terlebih setelah Indonesia memasuki era *Asean Economic Community* pada Desember 2015 nanti, yang perlu dilakukan oleh setiap individu di Indonesia adalah belajar dan terus menggali potensi diri untuk bisa menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu bersaing tidak hanya dengan sesama masyarakat Indonesia tetapi juga dengan masyarakat asing. Selain itu masyarakat juga harus bisa berperan sebagai hakim atas norma yang berlaku agar masyarakat Indonesia

tidak hanya menjadi manusia yang berkualitas secara ilmu namun juga secara moral atau akhlak.

3. Bagi Peneliti

- a. Penelitian ini hanya menggunakan data pada rentan tahun 2007-2013 dan tidak bisa menjadikan seluruh provinsi yang ada di Indonesia sebagai populasi, yaitu hanya 29 dari 33 provinsi. Oleh karena itu penelitian selanjutnya diharapkan bisa mendapatkan data yang lebih besar sehingga hasil yang didapat bisa lebih mewakili Indonesia.
- b. Peneliti selanjutnya bisa mencoba untuk menggunakan variabel nilai ekspor, impor, dan penanaman modal asing sebagai wujud globalisasi ekonomi karena terdapat perbedaan yang cukup jauh antara nilai dan rasio.

DAFTAR PUSTAKA

- Apridar. 2012. *Ekonomi Internasional*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Ariefianto, Doddy. 2012. *Ekonometrika, Esensi dan Aplikasi dengan Menggunakan Eviews*. Jakarta: Erlangga
- Ardiansyah. 2014. *Teori-teori Hukum Investasi dan Penanaman Modal*. Kajian Magister Ilmu Hukum Online. Tersedia: <https://customslawyer.wordpress.com/2014/06/26/teori-teori-hukum-investasi-dan-penanaman-modal/>. 16 September 2015
- Arsyad, Lincoln. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Badan Pusat Statistik. *Indeks Gini*. Diunduh dari <http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1493> pada 02 April 2015
- Badan Pusat Statistik. *Penanaman Modal Asing*. Diunduh dari <http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1337> pada 20 Juli 2015
- Badan Pusat Statistik. *Statistik Indonesia*. Diunduh dari [https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAAahUKEwiNr2jiNHIAhWRCI4KHZbXBCc&url=https%3A%2F%2Fgoogledrive.com%2Fhost%2F0B_A-EhzcIJX2bHR0eThqMUpLZ1E%2F2F%2F2F_SOSDUK_TIM%2FStatistik%2520Pendidikan%2520dan%2520Sosial%2520Budaya%25201.pdf&usg=AFQjCNGPkioV7fUwniodfYzaYxQBmXcig&bvm=bv.105454873,d.c2E](http://www.bps.go.id/index.php/publikasi/index?Publikasi%5BtahunJudu1%5D=&Publikasi%5BkataKunci%5D=statistik+indonesia&yt0=Tampilkan pada 21 Juli 2015</p><p>Badan Pusat Statistik. <i>Statistik Pendidikan dan Sosial Budaya</i>. Diunduh dari <a href=) pada 22 Juli 2015
- Bank Indonesia. *Kajian Ekonomi Regional*. Diunduh dari <http://www.bi.go.id/publikasi/kajian-ekonomi-regional/Contents/Default.aspx> pada 02 April 2015
- Bappenas dan BPS. 2013. *Data dan Informasi Kinerja Pembangunan 2004-2012*. Diunduh dari http://www.bappenas.go.id/files/6613/7890/Buku_Datin_Kinerja_Pembangunan_24-2012.pdf pada 22 Juli 2015
- Bappenas. 2015. *Laporan Nasional, Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah di 33 Provinsi Tahun 2014*. Diunduh dari

http://rc.bappenas.go.id/files/8114/2777/0576/laporan_nasional_ekpd_2015_Oke.pdf pada 22 Juli 2015

- Boediono. 1997. *Ekonomi Internasional*. Yogyakarta: BPFE
- Bremmer, Ian. 2011. *Akhir Pasar Bebas*, terj. Alex Tri Kantjono. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Daumal, Marie. 2008. *Impact of Trade Openness on Regional Inequality and Political Unity: the Cases of India and Brazil. Paper*. Universitas Paris Dauphine. Paris
- Deliarnov. 2012. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Rev.ed.. Jakarta: Rajawali Pers
- Gujarati, Damodar dan Dawn C. Porter. 2010. *Dasar-dasar Ekonometrika*,. Jakarta: Salemba Empat
- Ha, Eunyoung. 2012. *Globalization, Government Ideology, and Income Inequality in Developing Countries. The Journal of Politics*, Vol. 74, No. 2, pp. 541-557
- Hambali, Muhammad. 2008. *Menggugat Sistem Pasar Bebas (Telaah Kritis Ekonomi Islam Terhadap Mekanisme Distribusi Pendapatan Dalam Kapitalisme)*. Dialektika Online. Tersedia: <https://marx83.wordpress.com/2008/08/09/menggugat-sistem-pasar-bebas/>. 16 September 2015.
- Jaumotte, Florence, dkk. 2013. *Rising Income Inequality: Technology, or Trade and Financial Globalization?*. IMF Economic Review. Vol. 61 No.2
- Krugman, Paul dan Maurice Obstfeld. 2004. *Ekonomi Internasional, Teori dan Kebijakan*. Jilid 1, terj. Faisal Basri. Jakarta: PT. Indeks Kelmpok Gramedia
- Laksono, Dandhy Dwi. 2009. *Indonesia For Sale*. Surabaya: Pedati
- Muradi, Rudy. 2014. *Analisis Pertumbuhan dan Ketimpangan Antarpovinsi di Koridor Ekonomi Sulawesi Dalam Era Globalisasi*. Tesis. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta
- Milanovic, Branko. 2005. *Can We Discern the Effect of Globalization on Income Distribution? Evidence from Household Surveys. The World Bank Economic Review*, Vol. 19, No. 1, pp. 21-44
- Muhson, Ali. 2009. *Handout Mata Kuliah: Aplikasi Komputer*. Program Studi Pendidikan Ekonomi FISE UNY

- Murbarani, Nova. 2014. *Pengaruh Keterbukaan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Antarprovinsi di Indonesia*. Tesis. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Parhah, Siti. 2012. *Pengaruh Ekspansi Pendidikan Tinggi Terhadap Ketimpangan Pendaptan di Indonesia*. Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Koperasi. Vol. 7 No. 2. Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung
- Pusat Data dan Statistik Pendidikan. 2014. *APK/ APM PAUD, SD, SMP, SM dan PT (termasuk Madrasah dan sederajat) Tahun 2013/2014*. Diunduh dari <http://kemdikbud.go.id/kemdikbud/dokumen/BukuRingkasanDataPendidikan/Final%20APK-APM%202013-2014.pdf> pada 22 Juli 2015
- Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral. 2013. *Laporan Hasil Kajian: FTA dan EPA, dan Pengaruhnya terhadap Arus Perdagangan dan Investasi dengan Negara Mitra*. Diunduh dari [http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Free%20Trade%20Agreement%20\(FTA\)%20dan%20Economic%20Partnership%20Agreement%20\(EPA\),%20dan%20Pengaruhnya%20terhadap%20Arus%20Perdagangan%20dan%20Investasi%20dengan%20Negara%20Mitra.pdf](http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Free%20Trade%20Agreement%20(FTA)%20dan%20Economic%20Partnership%20Agreement%20(EPA),%20dan%20Pengaruhnya%20terhadap%20Arus%20Perdagangan%20dan%20Investasi%20dengan%20Negara%20Mitra.pdf) pada 05 Agustus 2015
- Ramly, Fahrudin. Determinan Ketimpangan Regional Di Indonesia Tahun 2000-2008. Skripsi. Universitas Pattimura.Ambon
- Salim dan Budi Sutrisno. 2008. *Hukum Investasi di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Simbolon Sofiyandi. 2011. *Pengaruh Foreign Direct Investment (FDI) Terhadap Tingkat Upah Pekerja: Pengalaman-pengalaman Negara Berkembang*. Online. Tersedia: <http://sofiyandi-simbolon.blogspot.co.id/2011/07/pengaruh-foreign-direct-investment-fdi.html>. 16 September 2015
- Sugiyono. 2010. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: CV Alfabeta
- Todaro, Michael dan Stephen Smith. 2006. *Pembangunan Ekonomi*. Jilid 1, terj. Haris Munandar. Jakarta: Erlangga
- UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing
- Pembangunan. Volume 9 No. 1. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Widarjono, Agus. 2007. *Ekonometrika Teori dan Aplikasi untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: Ekonisia FE UII

Willen, Paul, dkk. (2004). *Educational Opportunity and Income Inequality*. Working Paper 10879. NBER Working Paper Series

LAMPIRAN

DATA VARIABEL PENELITIAN

NO	PROVINSI	TAHUN	GINI	EKSPOR	IMPOR	PMA	APM	RLS	TK AGR	TK IND
1	Aceh	2007	26.80	1.132	0.332	0.224	61.95	8.5	49.679	4.826
		2008	27.00	1.984	1.342	0.000	62.19	8.5	48.471	5.349
		2009	29.00	1.838	2.636	0.006	62.12	8.63	48.893	4.662
		2010	30.00	0.287	0.341	0.053	62.42	8.81	45.590	4.382
		2011	33.00	0.589	0.439	0.226	61.37	8.9	48.488	3.914
		2012	32.00	0.594	0.792	1.700	61.82	8.9	46.864	4.106
		2013	34.10	0.336	0.052	0.955	63.43	9.05	46.527	4.049
2	Sumatera Utara	2007	30.70	34.109	33.042	0.953	54.95	8.6	47.600	7.613
		2008	31.00	33.918	10.877	0.576	55.16	8.6	47.122	8.078
		2009	32.00	27.662	9.303	0.615	55.30	8.65	46.719	8.687
		2010	35.00	19.345	7.993	0.598	55.72	8.85	46.941	7.428
		2011	35.00	31.844	10.653	2.105	57.48	8.91	43.897	8.186
		2012	33.00	26.994	9.693	1.724	60.29	9.07	43.395	7.685
		2013	35.40	24.066	9.401	2.296	62.19	9.13	43.453	7.106
3	Kep. Riau	2007	30.20	124.080	155.661	0.931	52.63	8.94	15.288	24.495
		2008	30.00	113.731	148.514	2.667	53.40	8.94	13.244	30.298
		2009	29.00	103.788	130.383	3.755	53.42	8.96	13.214	25.157
		2010	29.00	99.629	105.842	2.102	54.74	9.16	12.748	32.847
		2011	32.00	106.122	98.262	2.404	56.85	9.73	12.504	24.989
		2012	35.00	97.181	140.338	5.563	63.53	8.9	11.926	23.555
		2013	36.20	111.441	103.767	3.289	67.62	9.35	10.152	26.997
4	Riau	2007	32.30	52.312	17.690	3.150	51.54	8.4	48.820	6.467
		2008	31.00	46.300	9.430	1.614	51.84	8.51	49.301	5.276
		2009	33.00	26.473	5.678	0.880	51.78	8.56	48.391	5.751
		2010	33.00	26.637	3.244	0.228	52.24	8.58	44.654	5.845
		2011	36.00	28.294	4.467	0.451	53.31	8.63	44.800	6.012
		2012	40.00	25.113	3.376	2.306	53.06	8.64	44.728	6.104
		2013	37.40	23.288	3.208	2.611	58.74	8.78	44.256	6.513
5	Sumatera Barat	2007	30.50	18.669	1.301	0.897	54.23	8.18	47.929	7.408
		2008	29.00	22.625	2.482	0.383	54.68	8.26	47.246	6.561
		2009	30.00	16.056	0.664	0.003	54.50	8.45	45.433	6.563
		2010	33.00	19.771	1.201	0.082	55.06	8.48	44.101	6.775
		2011	35.00	20.789	1.543	0.203	54.78	8.57	39.295	7.395

		2012	36.00	17.041	1.829	0.639	55.68	8.6	40.601	7.805
		2013	36.30	15.622	0.696	0.752	61.00	8.63	39.336	6.459
6.	Jambi	2007	30.60	18.236	4.339	0.501	44.41	7.63	57.735	4.197
		2008	28.00	23.903	2.865	0.851	44.81	7.63	57.722	3.791
		2009	27.00	14.479	2.041	0.954	44.71	7.68	55.202	3.306
		2010	30.00	23.188	2.717	0.627	45.31	7.84	55.447	3.420
		2011	34.00	27.686	2.374	0.270	49.46	8.05	53.718	3.400
		2012	34.00	16.670	1.390	2.019	46.09	7.97	55.036	3.323
		2013	34.80	13.965	3.091	0.419	52.13	8.02	52.368	3.801
7.	Sumatera Selatan	2007	31.60	20.032	1.312	1.777	42.72	7.6	62.017	5.066
		2008	30.00	19.776	1.770	0.831	43.05	7.6	59.475	4.992
		2009	31.00	12.140	2.022	0.430	43.01	7.66	59.602	4.875
		2010	34.00	16.854	2.245	1.073	43.49	7.82	58.051	4.902
		2011	34.00	22.410	2.807	2.683	45.79	7.84	57.118	4.733
		2012	40.00	16.786	2.407	3.576	49.34	8.21	56.365	5.575
		2013	38.30	14.521	2.514	2.192	51.67	8.34	54.689	4.892
8.	Bangka Belitung	2007	25.90	38.613	0.000	4.432	37.53	7.18	34.429	4.076
		2008	26.00	42.868	0.881	0.077	37.72	7.37	33.226	4.816
		2009	29.00	53.870	31.122	1.013	38.13	7.41	31.275	4.941
		2010	30.00	51.637	1.905	0.748	38.69	7.45	32.722	4.465
		2011	30.00	72.911	2.018	4.205	41.92	7.58	25.929	5.459
		2012	29.00	58.391	2.151	1.612	42.93	7.68	28.573	6.169
		2013	31.30	54.763	7.656	3.017	50.80	7.73	28.062	6.059
9.	Lampung	2007	39.00	21.405	6.629	1.867	40.72	7.3	57.272	8.002
		2008	35.00	34.919	9.522	0.880	41.05	7.3	55.514	8.206
		2009	35.00	26.209	5.260	0.382	41.43	7.49	54.016	8.761
		2010	36.00	20.925	5.612	0.257	41.97	7.75	56.477	7.760
		2011	37.00	22.252	7.724	0.546	46.05	7.82	49.257	10.297
			36.00							
		2012	0	24.082	5.464	0.741	46.14	8.14	48.310	9.550
10.	DKI Jakarta	2013	35.60	24.969	6.859	0.298	53.48	8.12	51.465	8.388
		2007	33.60	11.428	47.046	7.543	49.76	10.8	0.519	18.440
		2008	33.00	12.021	53.211	14.193	50.05	10.8	0.469	16.101
		2009	36.00	10.343	50.158	7.563	50.43	10.9	0.618	16.217
		2010	36.00	8.851	46.927	6.776	50.57	10.93	0.607	16.099
		2011	44.00	9.805	51.344	4.311	49.91	10.95	0.663	15.056
		2012	42.00	9.840	54.290	3.491	54.25	10.98	0.527	14.609
11.	Banten	2013	43.30	10.535	58.415	2.156	55.40	11	0.418	18.376
		2007	36.50	45.368	7.586	5.270	38.97	8.05	22.434	20.545
		2008	34.00	46.991	103.602	3.306	38.83	8.1	22.159	19.238
		2009	37.00	37.920	95.169	9.624	38.77	8.15	20.116	22.774

		2010	42.00	40.939	84.511	8.168	39.61	8.32	15.768	22.996
		2011	40.00	43.617	96.360	9.911	46.24	8.41	13.911	25.177
		2012	39.00	41.753	97.932	11.951	53.00	8.61	13.089	25.841
		2013	39.90	40.774	92.552	15.899	53.28	8.61	14.992	25.914
12.	Jawa Timur	2007	33.70	15.270	10.302	2.875	47.97	6.9	44.752	13.110
		2008	33.00	16.373	18.260	0.712	47.93	6.95	43.651	12.775
		2009	33.00	15.145	14.049	0.639	48.26	7.2	42.931	12.358
		2010	34.00	15.063	14.883	2.064	48.60	7.24	42.461	13.277
		2011	37.00	14.460	15.414	1.302	49.29	7.34	39.704	14.073
		2012	36.00	13.317	16.667	2.154	52.36	7.48	39.158	14.857
		2013	36.40	13.872	16.754	3.124	53.30	7.54	37.444	14.401
13.	Jawa Barat	2007	34.40	26.027	11.860	2.304	38.29	7.5	26.861	17.454
		2008	35.00	31.080	16.709	3.901	38.31	7.5	25.558	17.811
		2009	36.00	28.798	8.924	2.916	38.59	7.72	25.179	18.185
		2010	36.00	22.888	10.178	1.992	38.84	8.02	23.398	20.005
		2011	41.00	26.216	12.618	3.909	42.45	8.08	21.058	20.464
		2012	41.00	26.050	12.375	4.159	51.24	8.15	21.650	21.087
		2013	41.10	25.214	11.909	6.958	52.25	8.09	19.934	21.270
14.	Jawa Tengah	2007	32.60	10.156	6.163	0.294	44.11	6.8	37.708	16.963
		2008	31.00	9.125	6.593	0.358	44.39	6.86	36.842	17.482
		2009	32.00	5.302	4.389	0.217	44.53	7.07	37.036	16.777
		2010	34.00	6.503	5.181	0.121	45.00	7.24	35.526	17.808
		2011	38.00	6.530	5.049	0.308	47.17	7.29	33.780	19.142
		2012	38.00	8.781	8.730	0.407	51.11	7.39	31.392	20.441
		2013	38.70	9.480	9.306	0.778	51.81	7.43	30.861	19.071
15.	DIY	2007	36.60	3.485	1.183	0.022	57.88	7.47	30.762	11.805
		2008	36.00	3.309	1.288	0.424	58.96	8.71	29.600	13.239
		2009	38.00	2.730	0.662	0.203	58.69	8.78	30.099	12.515
		2010	41.00	5.322	0.533	0.098	59.35	9.07	30.403	13.920
		2011	40.00	4.093	0.526	0.041	59.25	9.2	23.967	14.832
		2012	43.00	4.419	0.945	1.396	63.54	9.21	26.908	15.131
		2013	43.90	4.834	1.241	0.486	64.86	9.33	27.863	13.452
16.	Bali	2007	33.30	9.904	19.418	1.046	55.81	7.8	36.026	14.586
		2008	30.00	11.126	2.009	1.510	55.65	7.81	35.782	12.974
		2009	37.00	9.596	4.085	3.918	56.48	7.83	34.236	14.285
		2010	42.00	9.655	1.744	3.763	57.14	8.21	30.926	13.967
		2011	40.00	7.187	1.857	5.717	59.48	8.35	25.245	13.159
		2012	39.00	6.558	1.790	5.386	63.55	8.42	25.243	13.718
		2013	39.90	5.972	3.526	4.321	67.04	8.68	24.004	14.097
17.	Nusa Tangerang	2007	32.80	26.159	5.300	0.161	48.26	6.7	47.406	10.012
		2008	33.00	22.948	7.839	0.395	48.38	6.7	45.502	11.022

		Barat	2009	35.00	33.257	4.560	0.069	48.51	6.73	44.944	10.832
			2010	40.00	36.045	4.125	4.036	49.35	6.77	47.129	9.569
			2011	36.00	19.438	7.087	8.323	53.41	6.97	44.443	8.642
			2012	35.00	11.714	4.998	12.005	53.81	7.19	44.253	8.504
			2013	36.40	7.457	3.527	9.066	58.00	7.2	45.024	8.064
18.		Nusa Tangerang Timur	2007	35.30	0.768	0.711	0.019	33.75	6.42	68.534	8.232
			2008	34.00	0.683	0.204	0.063	34.67	6.55	70.087	6.818
			2009	36.00	1.024	0.615	0.172	34.15	6.6	68.154	6.229
			2010	38.00	1.208	0.599	0.124	34.93	6.99	64.701	6.985
			2011	36.00	0.594	0.341	0.155	40.33	7.05	64.890	5.949
			2012	36.00	0.428	1.750	0.232	38.19	7.09	61.612	7.563
			2013	35.20	0.558	0.397	0.256	47.30	7.25	60.899	7.175
19.		Kalimantan Selatan	2007	34.10	74.544	4.303	1.385	35.73	7.4	45.322	8.217
			2008	33.00	79.514	6.702	0.004	35.78	7.44	45.676	6.731
			2009	35.00	110.045	13.314	3.471	35.71	7.54	42.660	6.691
			2010	37.00	85.287	7.092	3.071	36.24	7.65	41.761	7.444
			2011	37.00	125.962	8.788	3.503	43.36	7.68	41.449	6.418
			2012	38.00	118.061	7.741	3.366	49.39	7.89	41.427	7.144
			2013	35.90	108.599	3.778	3.267	50.05	8.01	40.223	7.381
20.		Kalimantan Timur	2007	33.40	18.138	3.415	0.624	52.88	8.8	33.867	7.601
			2008	34.00	19.110	3.672	0.039	53.19	8.8	36.279	6.665
			2009	38.00	31.348	9.216	0.291	53.10	8.85	35.011	5.811
			2010	37.00	33.358	3.976	3.084	53.66	8.87	30.801	5.613
			2011	38.00	43.010	4.336	1.350	55.52	9.19	28.552	5.315
			2012	36.00	41.462	6.581	4.504	60.34	9.22	28.354	5.977
			2013	37.10	44.542	5.542	3.393	62.91	9.6	26.614	5.418
21.		Kalimantan Tengah	2007	29.70	16.058	1.315	2.538	39.28	8	59.242	4.304
			2008	29.00	15.990	0.829	1.853	39.13	8	60.672	3.699
			2009	29.00	13.616	0.903	0.137	39.27	8.02	59.847	2.983
			2010	30.00	26.005	1.218	11.664	39.62	8.03	55.233	3.478
			2011	34.00	22.492	1.237	9.732	44.99	8.06	54.751	2.829
			2012	33.00	19.864	2.079	8.807	43.55	7.39	55.410	2.595
			2013	35.00	22.444	0.739	7.925	45.43	7.43	52.702	2.967
22.		Kalimantan Barat	2007	30.90	14.982	1.805	0.235	36.16	6.7	62.518	4.290
			2008	31.00	18.197	1.897	0.784	36.65	6.7	64.160	4.149
			2009	32.00	9.132	1.063	0.533	36.40	6.75	63.136	3.633
			2010	37.00	14.004	1.621	2.557	36.83	6.82	60.430	4.817
			2011	40.00	23.459	2.572	6.569	36.86	6.89	60.305	4.169
			2012	38.00	16.366	4.192	4.974	37.44	7.14	59.496	3.702
			2013	39.60	16.755	2.965	7.996	44.79	7.17	57.575	3.339

23.	Sulawesi Utara	2007	32.40	16.327	2.323	0.368	50.45	8.8	41.093	4.898
		2008	28.00	22.609	0.358	1.197	50.45	8.8	39.752	4.807
		2009	31.00	13.202	0.502	1.816	50.46	8.82	36.759	6.118
		2010	37.00	9.277	1.760	5.597	50.70	8.89	38.162	5.403
		2011	39.00	15.734	3.030	4.622	50.15	8.92	32.413	6.660
		2012	43.00	17.824	2.229	0.928	51.15	9	32.606	6.047
		2013	42.20	16.445	1.888	1.286	57.26	9.09	34.234	5.380
24.	Sulawesi Selatan	2007	37.00	37.554	4.793	0.828	41.91	7.23	53.784	5.014
		2008	36.00	23.990	7.651	0.317	41.99	7.23	51.463	5.849
		2009	39.00	13.913	5.620	0.801	42.03	7.41	49.302	6.662
		2010	40.00	15.530	5.082	3.405	42.75	7.84	48.053	6.031
		2011	41.00	11.927	4.156	0.572	48.17	7.92	43.527	6.614
		2012	41.00	9.129	4.786	3.419	54.20	7.95	44.022	6.739
		2013	42.90	9.027	5.925	2.618	54.26	7.95	43.392	5.965
25.	Sulawesi Tengah	2007	32.00	9.899	0.021	0.279	39.27	7.73	59.555	4.457
		2008	33.00	9.435	0.001	0.051	39.93	7.81	59.349	4.437
		2009	34.00	10.157	0.389	0.106	39.52	7.89	59.121	3.820
		2010	37.00	9.176	0.222	3.372	40.23	8	56.960	3.337
		2011	38.00	5.522	0.082	7.339	48.50	8.03	51.922	5.214
		2012	40.0	5.139	0.037	14.803	52.25	8.13	49.882	5.341
		2013	40.70	4.794	3.262	15.238	58.38	8.22	49.253	5.045
26.	Maluku	2007	32.80	20.708	2.279	0.000	59.38	8.6	60.298	4.277
		2008	31.00	19.123	1.368	0.000	59.38	8.6	58.890	5.273
		2009	31.00	18.172	1.997	0.000	59.58	8.63	56.283	6.486
		2010	33.00	13.543	1.914	0.326	59.80	8.76	51.416	5.006
		2011	41.00	15.077	1.610	1.070	52.78	8.82	49.452	6.974
		2012	38.00	12.440	0.799	0.695	50.20	10.05	48.986	6.124
		2013	37.00	9.891	0.451	4.166	55.59	10.8	48.069	3.340
27.	Maluku Utara	2007	33.20	138.284	2.080	0.000	51.39	8.6	60.353	3.911
		2008	33.00	65.971	9.168	0.000	51.73	8.6	59.213	3.808
		2009	33.00	25.633	0.055	1.308	51.74	8.61	58.729	2.185
		2010	34.00	34.029	2.543	41.463	52.68	8.63	58.049	2.384
		2011	33.00	82.759	6.083	18.871	52.36	8.66	55.117	2.458
		2012	34.00	63.611	1.689	12.243	56.76	8.72	54.999	3.352
		2013	31.80	97.406	0.622	36.324	59.54	8.72	54.310	2.051
28.	Papua	2007	41.20	58.703	11.245	0.007	35.78	6.52	75.057	1.955
		2008	40.00	29.656	12.582	0.280	35.79	6.52	72.643	1.646
		2009	38.00	52.170	6.271	0.024	35.77	6.57	74.290	1.762
		2010	41.00	52.615	5.477	3.413	36.06	6.66	77.854	1.251
		2011	42.00	42.021	8.239	15.057	30.77	6.69	70.214	1.347
		2012	44.00	25.721	9.620	14.573	29.16	6.3	72.831	1.112

		2013	44.20	30.613	4.541	26.483	36.72	5.8	72.896	1.373
29.	Papua Barat	2007	29.90	277.075	0.000	0.176	43.16	7.65	55.687	3.694
		2008	31.00	136.115	0.028	0.062	43.74	7.67	58.792	3.589
		2009	35.00	51.497	2.699	0.057	43.55	8.01	56.596	3.737
		2010	38.00	36.632	2.268	0.581	44.75	8.21	54.039	3.886
		2011	40.00	53.605	1.944	0.803	48.38	8.26	48.476	3.440
		2012	43.00	44.784	1.761	0.695	44.98	8.45	46.519	5.165
		2013	43.10	41.642	0.850	1.113	53.80	8.5	48.710	3.641

*Sumber : Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, Badan Koordinasi Penanaman Modal
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (diolah)*

HASIL UJI LIKELIHOOD RATIO/ UJI CHOW

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	14.183168	(28,167)	0.0000
Cross-section Chi-square	247.109588	28	0.0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: GINI

Method: Panel Least Squares

Date: 12/11/15 Time: 09:10

Sample: 2007 2013

Periods included: 7

Cross-sections included: 29

Total panel (balanced) observations: 203

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
REKS	-0.018044	0.009283	-1.943746	0.0534
RIM	-0.038143	0.017375	-2.195307	0.0293
RPMA	0.180469	0.052983	3.406193	0.0008
APM	-0.047811	0.044519	-1.073953	0.2842
RLS	0.573955	0.508513	1.128691	0.2604
TKAGR	0.006175	0.037512	0.164612	0.8694
TKIND	0.215488	0.098819	2.180643	0.0304
C	31.21414	5.325941	5.860774	0.0000
R-squared	0.120999	Mean dependent var	35.26453	
Adjusted R-squared	0.089445	S.D. dependent var	4.120238	
S.E. of regression	3.931655	Akaike info criterion	5.614609	
Sum squared resid	3014.293	Schwarz criterion	5.745179	
Log likelihood	-561.8828	Hannan-Quinn criter.	5.667433	
F-statistic	3.834672	Durbin-Watson stat	0.405450	
Prob(F-statistic)	0.000627			

HASIL UJI HAUSMAN

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	73.078296	7	0.0000

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
REKS	-0.025294	-0.028655	0.000014	0.3746
RIM	-0.003149	-0.022252	0.000154	0.1240
RPMA	-0.014118	0.079820	0.000255	0.0000
APM	0.075153	0.121319	0.000868	0.1170
RLS	0.950680	0.773039	0.248756	0.7217
TKAGR	-0.535163	-0.141851	0.005240	0.0000
TKIND	-0.108473	-0.090443	0.012797	0.8734

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: GINI

Method: Panel Least Squares

Date: 12/11/15 Time: 09:11

Sample: 2007 2013

Periods included: 7

Cross-sections included: 29

Total panel (balanced) observations: 203

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	48.73805	9.875413	4.935292	0.0000
REKS	-0.025294	0.009173	-2.757453	0.0065
RIM	-0.003149	0.021507	-0.146432	0.8838
RPMA	-0.014118	0.043590	-0.323877	0.7464
APM	0.075153	0.053439	1.406312	0.1615
RLS	0.950680	0.768047	1.237789	0.2175
TKAGR	-0.535163	0.089808	-5.958994	0.0000
TKIND	-0.108473	0.161585	-0.671306	0.5030

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.739788	Mean dependent var	35.26453
Adjusted R-squared	0.685252	S.D. dependent var	4.120238
S.E. of regression	2.311552	Akaike info criterion	4.673183
Sum squared resid	892.3263	Schwarz criterion	5.260746
Log likelihood	-438.3280	Hannan-Quinn criter.	4.910888
F-statistic	13.56525	Durbin-Watson stat	1.352251
Prob(F-statistic)	0.000000		

HASIL REGRESI FIXED EFFECT

Dependent Variable: GINI
 Method: Panel Least Squares
 Date: 12/11/15 Time: 09:09
 Sample: 2007 2013
 Periods included: 7
 Cross-sections included: 29
 Total panel (balanced) observations: 203

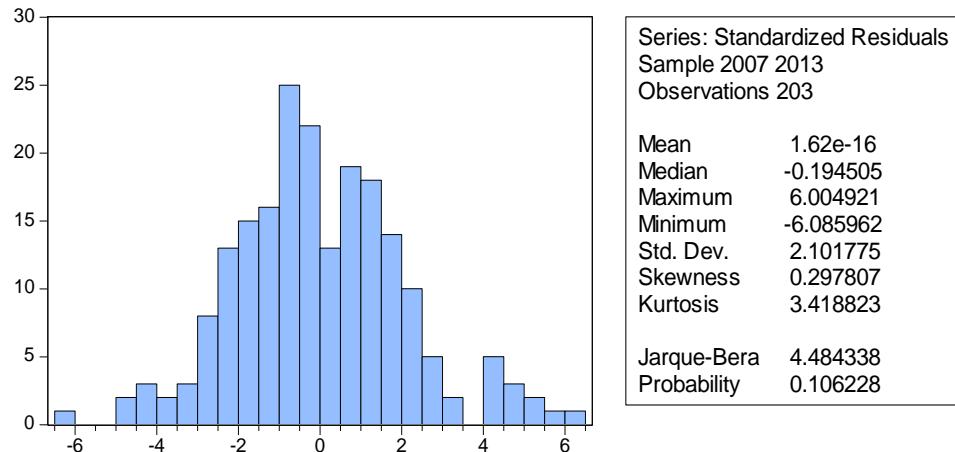
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
REKS	-0.025294	0.009173	-2.757453	0.0065
RIM	-0.003149	0.021507	-0.146432	0.8838
RPMA	-0.014118	0.043590	-0.323877	0.7464
APM	0.075153	0.053439	1.406312	0.1615
RLS	0.950680	0.768047	1.237789	0.2175
TKAGR	-0.535163	0.089808	-5.958994	0.0000
TKIND	-0.108473	0.161585	-0.671306	0.5030
C	48.73805	9.875413	4.935292	0.0000

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.739788	Mean dependent var	35.26453
Adjusted R-squared	0.685252	S.D. dependent var	4.120238
S.E. of regression	2.311552	Akaike info criterion	4.673183
Sum squared resid	892.3263	Schwarz criterion	5.260746
Log likelihood	-438.3280	Hannan-Quinn criter.	4.910888
F-statistic	13.56525	Durbin-Watson stat	1.352251
Prob(F-statistic)	0.000000		

HASIL UJI ASUMSI-NORMALITAS



HASIL UJI ASUMSI-MULTIKOLINIERITAS

	REKS	RIM	RPMA	APM	RLS	TKAGR	TKIND
REKS	1.0000	0.3545	0.0958	-0.0966	0.0115	-0.0827	0.0950
RIM	0.3543	1.0000	0.1416	0.1124	0.3202	-0.5955	0.7298
RPMA	0.0958	0.1416	1.0000	0.0108	0.0574	-0.0491	0.0073
APM	-0.0966	0.1124	0.0108	1.0000	0.6325	-0.3951	0.1956
RLS	0.0115	0.3202	0.0574	0.6325	1.0000	-0.6036	0.2399
TKAGR	-0.0827	-0.5955	-0.0491	-0.3951	-0.6036	1.0000	-0.7804
TKIND	0.0950	0.7298	0.0073	0.1956	0.2399	-0.7804	1.0000